

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Mei 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Mei 2026

TRIWULANAN
Triwulan II 2026

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Mei 2026

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam - Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Mei 2026 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, Mei 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Rony Widjarto P.
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	65



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	5
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	6
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	7
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	7
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	8
BOKS 1	9
Laporan Liaison Triwulan I 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	
BOKS 2	13
Dinamika Ekspor Produk Elektronik Kepri di tengah Tekanan Rantai Pasok dan Kebijakan Perdagangan Global	
Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	15
2.1 REALISASI PENDAPATAN	17
2.2 REALISASI BELANJA	18
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	20

Bab III	
Perkembangan Inflasi	23
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	26
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	26
3.2.1 Inflasi Kota Batam	27
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	27
3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun	27
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	28
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	29
Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	31
4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	33
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	33
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	34
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	34
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	36
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	36
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	36
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	36
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	38
BOKS 3	39
Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026: Sinergi Memperkuat Ekosistem Halal dan Ekonomi Syariah Kepri	



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	41
5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	43
5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	43
5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	44
5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	44
5.2.1 Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	44
5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	44
5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	45
5.2.4 Perkembangan QRIS	45
5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	46
5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	47
5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai	47
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	47
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB	48
5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR	48
5.3.3 Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	48

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

6.1 KETENAGAKERJAAN	51
6.1.1 Ketenagakerjaan	53
6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	54
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	54
6.2.2 Kemiskinan	55
6.2.3 Gini Ratio (GR)	55
6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	59
7.2 PROSPEK INFLASI	61
7.3 REKOMENDASI	62

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel B1.1	<i>Likert Scale</i> Tahun TW I 2023 s.d TW I 2026 di Kepri	9
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan I 2026	18
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan I 2026	19
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	21
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	25
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri Maret 2026	25
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Maret 2026	25
Tabel 3.4	Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Maret 2026	25
Tabel 3.5	Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Maret 2026	26
Tabel 3.6	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	26
Tabel 3.7	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% , yoy)	28
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	33
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	35
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	37
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	54
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	54
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	55
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	55
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	56
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	57
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2026	62
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2026	62

Daftar Gambar

Gambar B3.1	Pembukaan KURMA 2026 oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau	40
Gambar B3.2	<i>Fashion Show</i> dalam rangkaian KURMA 2026	40
Gambar B3.3	Perlombaan dalam KURMA 2026	40
Gambar B3.4	Seminar Ekonomi Keuangan Syariah	40
Gambar B3.5	Bazaar Produk Unggulan UMKM Kepulauan Riau	40
Gambar B3.6	Penutupan KURMA 2026 oleh Menteri Dalam Negeri RI	40

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3	Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan I 2026	17
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3	Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	18
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4	Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan I 2026	19
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	4	Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan I 2026	19
Grafik 1.5	Realisasi Belanja APBD	4	Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	20
Grafik 1.6	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	4	Grafik 3.1	Inflasi Triwulan I 2026 Regional Sumatera (% yoy)	26
Grafik 1.7	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan I 2026 (% yoy)	26
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	27
Grafik 1.9	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	5	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	34
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	5	Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	34
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal	6	Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	34
Grafik 1.12	<i>Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products</i>	6	Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	34
Grafik 1.13	Perkembangan Impor	6	Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	35
Grafik 1.14	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	6	Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	35
Grafik 1.15	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	6	Grafik 4.9	Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air	35
Grafik 1.16	Konsumsi Listrik Industri	7	Grafik 4.10	Kredit Konstruksi	35
Grafik 1.17	Perkembangan Impor Bahan Baku	7	Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	36
Grafik 1.18	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8	Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	36
Grafik 1.19	Kredit Sektor Konstruksi	8	Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	36
Grafik 1.20	SBT Perdagangan	8	Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	37
Grafik 1.21	Perkembangan Ekspor Migas	8	Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	37
Grafik B1.1	Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik	10	Grafik 4.18	DPK Perseorangan	37
Grafik B1.2	LS Persediaan & LS Perkiraan Penjualan ke Depan	10	Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	37
Grafik B1.3	LS Persediaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE)	10	Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	38
Grafik B2.1	Ekspor Migas dan Non Migas Kepri	13	Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	43
Grafik B2.2	Pangsa Nominal Ekspor HS 85	13	Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	43
Grafik B2.3	Pangsa Nominal Ekspor HS 85	13	Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	44
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan I 2026	17	Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	44
			Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	44

Daftar Grafik

Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	45
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	45
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	45
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	45
Grafik 5.10	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kab/ Kota di Provinsi Kepri Triwulan I 2026	46
Grafik 5.11	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha Triwulan I 2026	46
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.14	Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.15	Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.16	Penyaluran Program Sembako Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.17	Perkembangan Transaksi KUPVA	48
Grafik 5.18	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	48
Grafik 5.19	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	48
Grafik 5.20	Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen Sepanjang Tahun 2025	49
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	54
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	54
Grafik 6.3	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	56
Grafik 6.4	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	56
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	56
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	61
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	61
Grafik 7.3	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Penjualan Domestik	61
Grafik 7.4	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Investasi	61

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi sebesar 7,04% (yoy), namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy).	Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi sebesar 7,04% (yoy), namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,13% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan I 2026 tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.	Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan I 2026 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan yang terjadi pada seluruh pos yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.
Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025.	Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy). Tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan I 2026 masih berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan I 2026 secara umum tetap terjaga.	Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 secara umum tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan kualitas, di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang mengalami deselerasi. Melambatnya laju kredit tersebut diimbangi oleh akselerasi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta didukung oleh fungsi intermediasi yang tetap kuat tercermin dari Loan to Deposit Ratio/LDR dan risiko kredit (<i>Non-Performing Loan/NPL</i>) yang semakin terkendali.

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif pada triwulan I 2026. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Transaksi pembayaran tunai di Provinsi Kepri tetap terjaga pada triwulan I 2026. Selain itu, transaksi non-tunai juga tercatat mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran..

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Prospek perekonomian global diperkirakan memburuk dengan ketidakpastian gejolak global yang tetap tinggi. Kondisi ini diperkirakan didorong oleh dampak perang timur tengah, penutupan selat Hormuz hingga terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara. Sementara momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia perlu dijaga dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh melambat utamanya disebabkan faktor *base effect*.

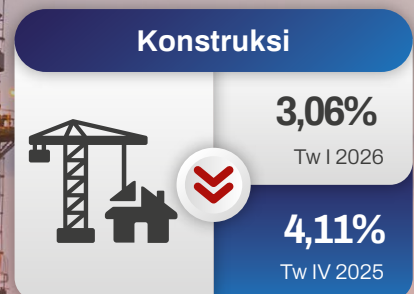
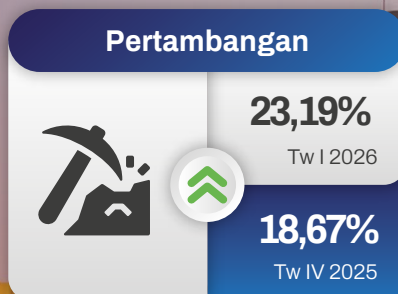
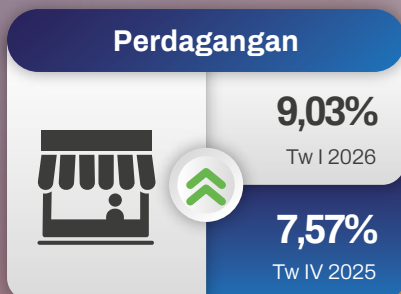
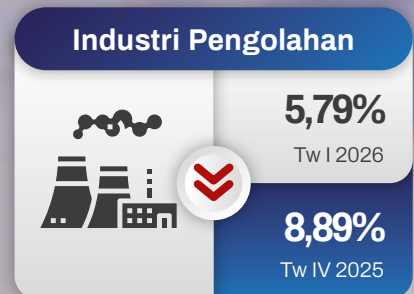
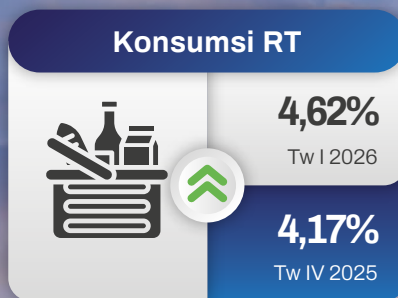
Perekonomian global diperkirakan cenderung stagnan. Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.

Inflasi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terjaga yang didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasokan, dan sinergi TPID dan GPIPS.

BAB 1

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



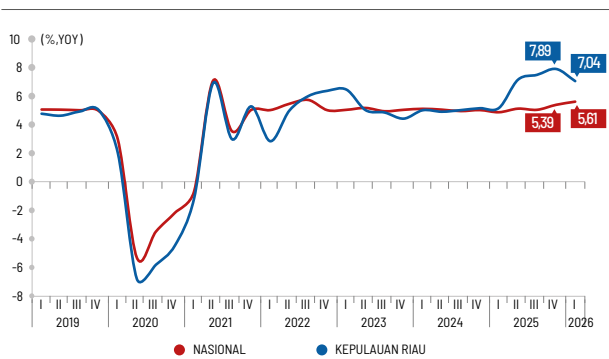
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi sebesar 7,04% (yoy), namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,13% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.

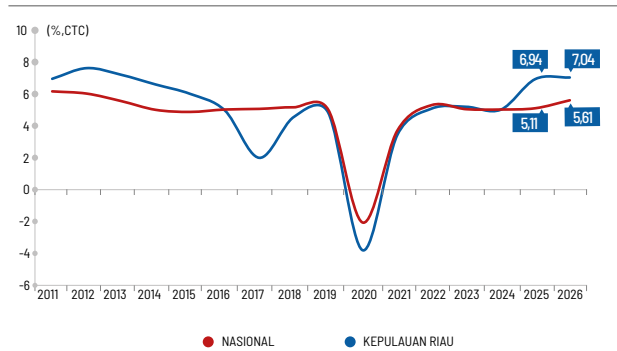


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kepri pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp57.649,79 miliar atau tumbuh 7,04% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,89% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh kuatnya komponen PMTB, Konsumsi Rumah Tangga, dan Net Ekspor.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan I 2026 lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tumbuh 5,13% (yoy) maupun capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera dicapai oleh Kepri, Lampung, dan Sumatera Selatan masing-masing sebesar 7,04% (yoy), 5,58% (yoy), dan 5,34% (yoy). Adapun pangsa PDRB Kepri triwulan I 2026 terhadap regional Sumatera tercatat sebesar 7,30%, atau terbesar kelima setelah Sumatera Utara (23,50%), Riau (23,29%), Sumatera Selatan (13,60%) dan Lampung (9,72%).



Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulan)



Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Struktur PDRB Kepri pada triwulan I 2026 didominasi oleh PMTB/ investasi dengan pangsa sebesar 44,09%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,82% dari total PDRB. Tingginya pangsa komponen investasi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha, khususnya pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal serta investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, dukungan belanja modal pemerintah turut menopang investasi terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan tetap tumbuh positif sejalan dengan momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang jatuh pada triwulan I.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 10,86%, sejalan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Adapun konsumsi pemerintah menempati pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 3,78%, didukung oleh berlanjutnya realisasi belanja pemerintah untuk program-program strategis.

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025(%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026(%, yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025(%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026(%, qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025(%, ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026(%, ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera(%)
1	Aceh	-1,61	4,09	-0,05	-0,61	2,97	4,09	4,88
2	Sumatera Utara	4,23	4,98	0,13	-0,28	4,53	4,98	23,50
3	Sumatera Barat	1,69	5,02	0,39	3,15	3,37	5,02	6,83
4	Riau	4,94	4,89	0,12	-0,33	4,79	4,89	23,29
5	Jambi	5,24	4,33	1,30	-4,55	4,93	4,33	6,52
6	Sumatera Selatan	5,54	5,34	-1,53	-0,02	5,35	5,34	13,60
7	Bengkulu	4,79	4,72	3,34	-2,34	4,80	4,72	2,10
8	Lampung	5,54	5,58	-3,05	-1,08	5,28	5,58	9,72
9	Kep. Bangka Belitung	4,54	4,53	4,87	-3,88	4,09	4,53	2,26
10	Kepulauan Riau	7,89	7,04	7,35	-3,54	6,94	7,04	7,30
SUMATERA		4,54	5,13	0,36	-0,78	4,81	5,13	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

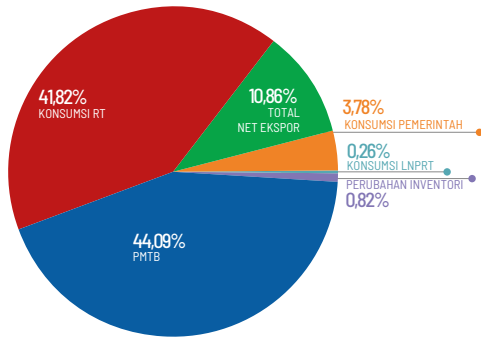
Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025				Total	2026	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	3,06	4,53	3,15	3,90	4,12	4,17	3,84	4,62	▲
2. Konsumsi LNPR	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	7,49	3,51	9,46	4,82	10,86	▲
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	34,37	18,49	7,51	-6,16	8,36	4,30	-22,07	-2,34	3,72	-4,28	18,02	▲
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	8,70	9,05	6,24	6,81	7,47	▼
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	-213,45	-198,09	-273,92	-46,36	-37,43	-5,87	-6,09	55,46	-11,15	-36,93	-23,84	▼
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	1,23	-23,18	16,84	29,58	3,42	14,53	25,35	16,74	27,02	20,52	9,95	▲
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-0,44	4,92	2,17	18,48	6,22	18,79	20,62	11,47	8,42	14,52	4,09	▼
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-0,64	8,36	0,89	17,60	6,50	19,30	20,21	10,94	6,80	13,94	3,42	▼
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	7,89	6,94	7,04	▲

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

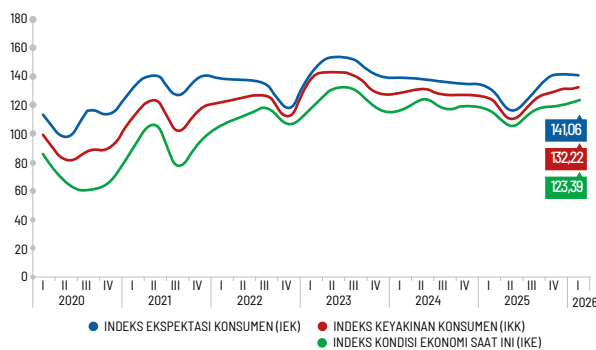


Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,17% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 130,75 pada triwulan IV 2025 menjadi 132,22 pada triwulan I 2026. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin kuat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan I 2026 juga didukung oleh momen libur HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.

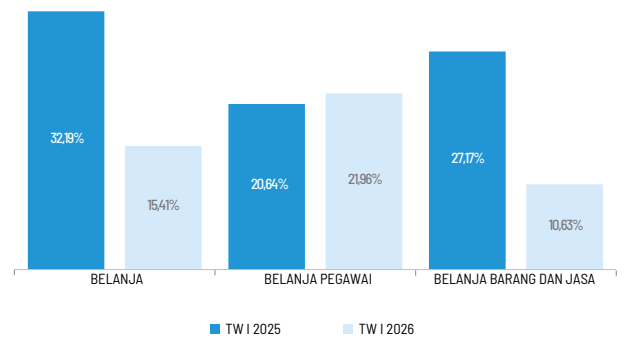


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

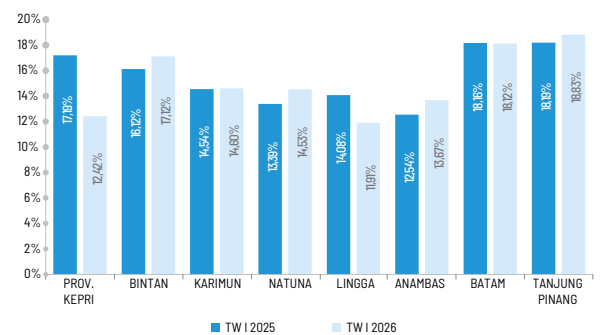
1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 18,02% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,72% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2026 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 didorong oleh pencairan THR PNS yang jatuh di triwulan I. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada APBD Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang, yang masing-masing mencatatkan realisasi APBD hingga Maret 2026 sebesar 17,12%; 14,60%; 14,53%; 13,67%; dan 18,83% dari pagu belanja.



Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.5 Realisasi Belanja APBD

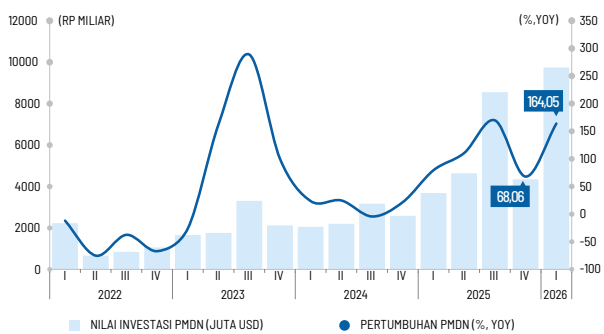


Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri

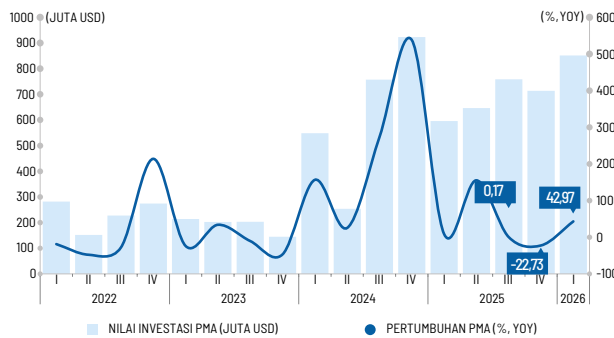
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,47% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,24% (yoy). Akselerasi tersebut sejalan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh sebesar 164,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 68,06% (yoy). Penanaman Modal Asing (PMA) juga meningkat dari yang sebelumnya berkontraksi sebesar 22,73% (yoy), menjadi tumbuh sebesar 42,97% (yoy). Keberlanjutan perkembangan PMDN dan PMA menunjukkan bahwa Kepri tetap menjadi salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia.



Sumber : BKPM (data diolah)

Grafik 1.7 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

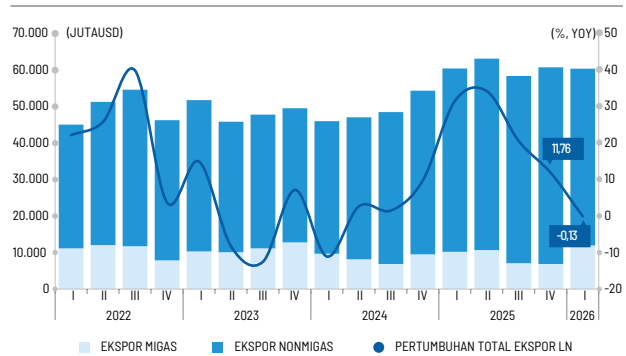


Sumber : BKPM (data diolah)

Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

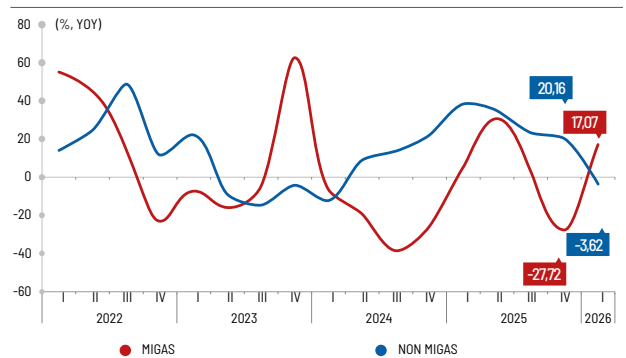
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Import

Komponen net ekspor Kepri pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,95% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 27,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 4,09% (yoy), atau terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,42% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 3,42% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 6,80% (yoy). Ekspor yang terdeselerasi sejalan dengan nilai ekspor total (migas dan nonmigas)



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



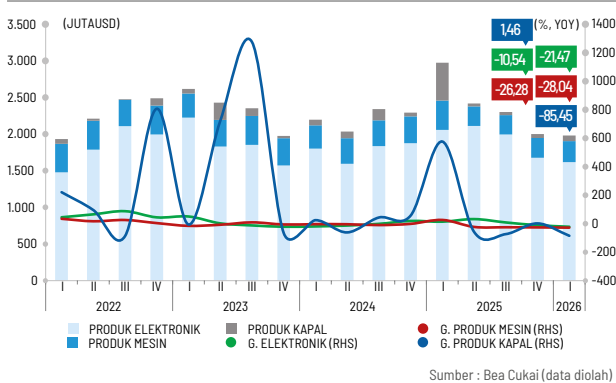
Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

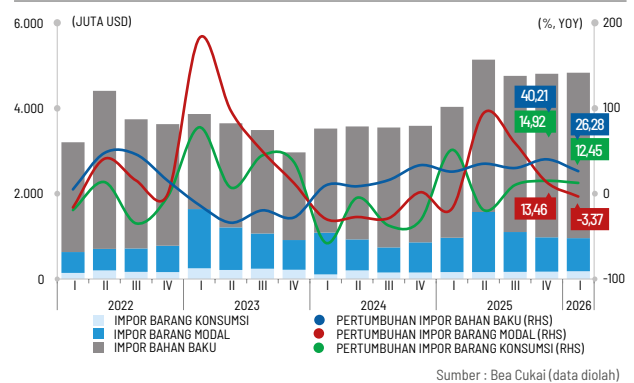
yang mengalami kontraksi sebesar 0,13% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,76% (yoy).

Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor nonmigas. Ekspor nonmigas mengalami kontraksi sebesar 3,62% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,16% (yoy).

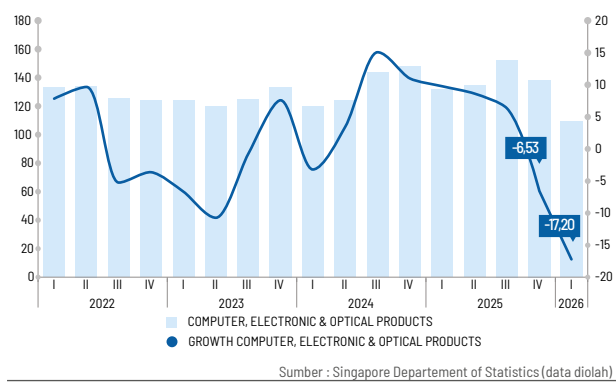
Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor migas dan normalisasi ekspor produk elektronik. Secara nominal, ekspor produk elektronik menurun, dari yang berkontraksi 10,54% (yoy), menjadi berkontraksi lebih dalam sebesar 21,47% (yoy). Lebih lanjut, kinerja ekspor produk mesin turut mengalami perlambatan. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar 28,04% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 26,28% (yoy). Nominal ekspor produk kapal juga mengalami perlambatan dengan berkontraksi sebesar 85,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,46% (yoy). *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk *Computer, Electronic, & Optical Products* mengalami penurunan pada triwulan I, dari yang sebelumnya berkontraksi 6,53% (yoy) menjadi berkontraksi 17,20% (yoy). Hal ini mengkonfirmasi kinerja net ekspor Kepri yang mengalami perlambatan didukung oleh permintaan yang berkurang dari negara importir utama, yaitu Singapura.



Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal

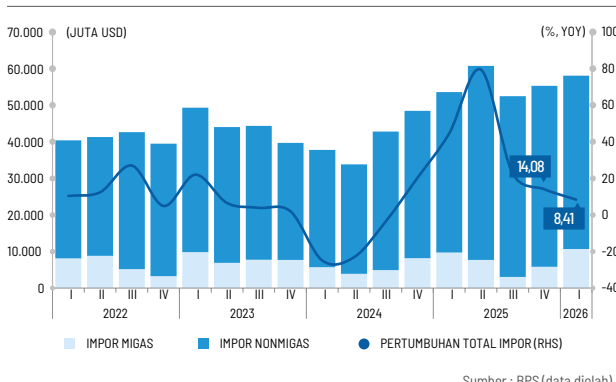


Grafik 1.14 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



Grafik 1.12 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products

Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor yang melambat, PDRB impor turut mengalami deselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 8,41% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,08% (yoy). Nilai impor barang modal pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar 3,37% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,46% (yoy). Impor bahan baku tumbuh sebesar 26,28% (yoy), mengalami perlambatan dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 40,21% (yoy). Lebih lanjut, Impor barang konsumsi turut melambat sebesar 12,45% (yoy), terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,92% (yoy).

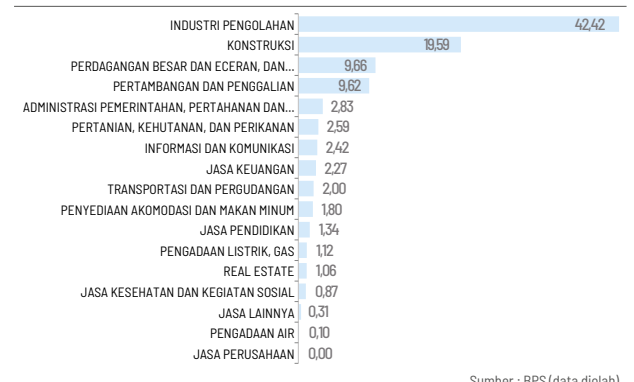


Grafik 1.13 Perkembangan Impor

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan pada triwulan laporan didorong oleh melambatnya kinerja lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dan konstruksi. Meskipun demikian, kinerja sektor pertambangan dan perdagangan yang tetap kuat serta terakselerasi pada triwulan I 2026 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 42,42%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,59%, diikuti LU Perdagangan dan LU Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 9,66% dan 9,62%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan yang melambat sejalan dengan perlambatan ekspor elektronik di tengah ketidakpastian geopolitik dan penerapan *preliminary tariff* untuk produk solar panel asal Indonesia yang diimpor ke AS. LU Konstruksi tumbuh melambat sejalan dengan pola awal tahun dimana proyek-proyek swasta dan pemerintah masih dalam tahap pengadaan dan uji kelayakan. Di sisi lain, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian masih tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri dan *low base effect* di periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat.



Grafik 1.15 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

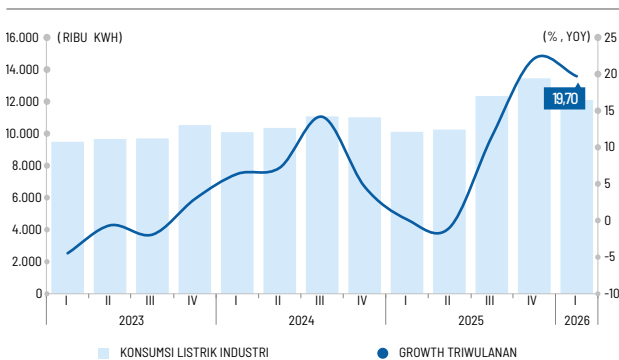
PDRB Sisi Lapangan Usaha	2023					2024					2025				Total	2026	ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	-2,75	13,40	19,80	-13,42	3,49	-1,05	▼
Pertambangan dan Penggalian	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,89	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	0,99	24,21	19,83	18,67	16,01	23,19	▼
Industri Pengolahan	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	7,30	6,96	6,82	8,89	7,52	5,79	▲
Pengadaan Listrik, Gas	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	2,70	9,71	15,63	12,99	10,37	11,46	▼
Pengadaan Air	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	7,33	16,89	14,56	8,51	11,70	2,11	▼
Konstruksi	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	3,84	7,75	5,71	4,11	5,30	3,06	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	10,29	6,96	5,54	7,57	7,55	9,03	▲
Transportasi dan Pergudangan	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	3,57	6,27	12,94	6,04	7,18	6,28	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	2,47	-0,63	5,35	4,41	2,87	7,76	▼
Informasi dan Komunikasi	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	-5,98	-8,96	-4,52	10,59	-2,65	7,82	▲
Jasa Keuangan	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	5,05	0,15	-0,85	12,16	4,11	0,44	▲
Real Estate	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	-0,13	11,38	6,23	5,28	5,71	9,46	▼
Jasa Perusahaan	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	26,89	25,03	12,58	5,34	16,70	8,83	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	8,10	-15,16	-0,15	6,15	-1,46	7,28	▲
Jasa Pendidikan	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	9,01	6,07	6,68	1,03	5,48	5,07	▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	9,04	-0,07	4,74	-2,12	2,67	3,23	▼
Jasa lainnya	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	16,41	-3,27	-5,98	4,28	1,96	13,12	▲
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	7,89	6,94	7,04	▲

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

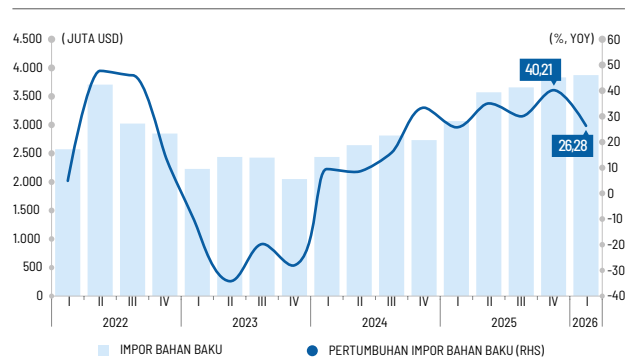
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,79% (yoy), mengalami deselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,89% (yoy) dan memberikan andil 2,50% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang melambat tercermin dari penurunan konsumsi listrik industri dari yang sebelumnya tumbuh 22,13% (yoy) menjadi 19,70% (yoy). Selanjutnya, perlambatan ini juga terkonfirmasi melalui impor bahan baku yang tumbuh melambat sebesar 26,28% (yoy), setelah triwulan sebelumnya tumbuh 40,21% (yoy).



Grafik 1.16 Konsumsi Listrik Industri

Sumber: PLN Persero (data diolah)

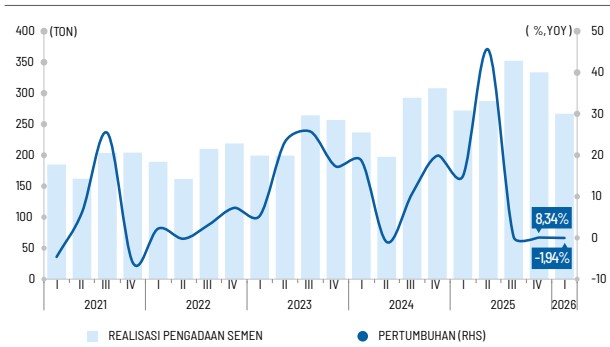


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.17 Perkembangan Impor Bahan Baku

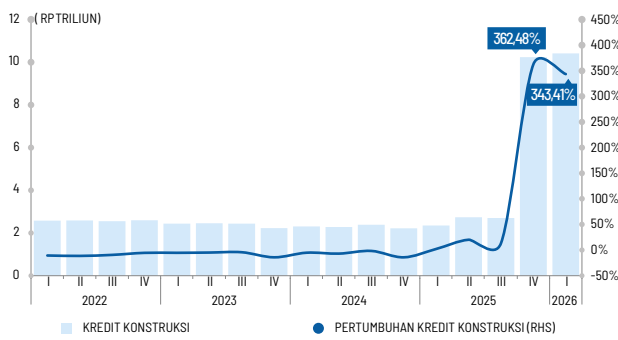
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 3,06% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,11% (yoy). Melambatnya kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari melambatnya penjualan semen di triwulan I yang tercatat mengalami kontraksi 1,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,34%. Kredit sektor konstruksi juga melambat dari yang sebelumnya tumbuh 362,48% (yoy) menjadi 343,41% (yoy) pada triwulan I 2026. LU Konstruksi tumbuh melambat sejalan dengan pola awal tahun dimana proyek-proyek swasta dan pemerintah masih dalam tahap pengadaan dan uji kelayakan.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)

Grafik 1.18 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.19 Kredit Sektor Konstruksi

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 9,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,57% (yoy). Lebih lanjut, penguatan pada LU perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menghasilkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perdagangan sebesar 4,05%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,24%. Penguatan kinerja lapangan usaha perdagangan utamanya didorong oleh masifnya aktivitas dan mobilisasi masyarakat pada periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.

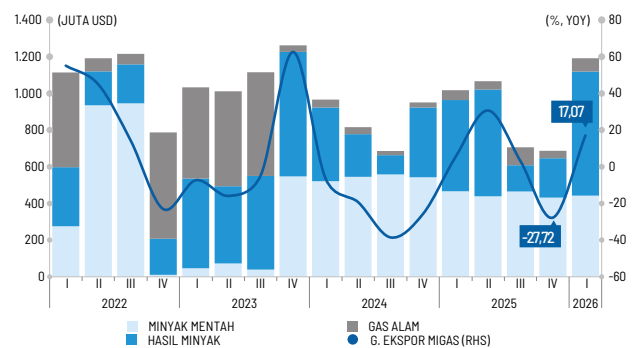


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.20 SBT Perdagangan

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan I 2026 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 23,19% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,67% (yoy). LU Pertambangan yang tumbuh menguat ditunjukkan oleh ekspor migas yang juga tumbuh menguat sebesar 17,07% (yoy), terutama akibat ekspor hasil minyak yang meningkat dari sebelumnya berkontraksi sebesar 43,36% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 36,19% (yoy). Ekspor minyak mentah juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berkontraksi 20,51% (yoy), menjadi berkontraksi 5,20% (yoy). Di sisi lain, ekspor gas alam mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh 45,49% (yoy) menjadi 33,61% (yoy) pada triwulan I 2026.



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.21 Perkembangan Ekspor Migas

BOKS 1

LAPORAN LIAISON TRIWULAN I 2026 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan liaison kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus liaison pada triwulan I tahun 2026 mencakup 12 kontak perusahaan. Adapun sebaran kontak yaitu pada industri pengolahan (50,0%), perdagangan besar dan eceran (16,7%), jasa konstruksi (8,3%), real estate (8,3%), pertanian, kehutanan, perikanan (8,3%), penyediaan akomodasi dan makan minum (8,3%). Ruang lingkup analisis laporan liaison mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan *margin*, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis di masa yang akan datang dengan ringkasan nilai likert sebagaimana Tabel B1.1.

Berdasarkan hasil liaison, produksi/penjualan domestik Kepri pada triwulan I 2026 mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri. Secara umum, kinerja penjualan/produksi domestik di wilayah Kepri melemah, terutama pada sektor Konstruksi serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penurunan pada sektor Konstruksi didorong oleh berlanjutnya kebijakan efisiensi pemerintah. Sementara pelemahan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh pergeseran HBKN Imlek yang berlangsung pada awal triwulan I 2026, sehingga berdekatan dengan HBKN Natal dan Tahun Baru. Kedekatan periode tersebut menyebabkan konsentrasi aktivitas liburan pada salah satu momentum HBKN, sehingga spillover terhadap okupansi dan penjualan menjadi terbatas.

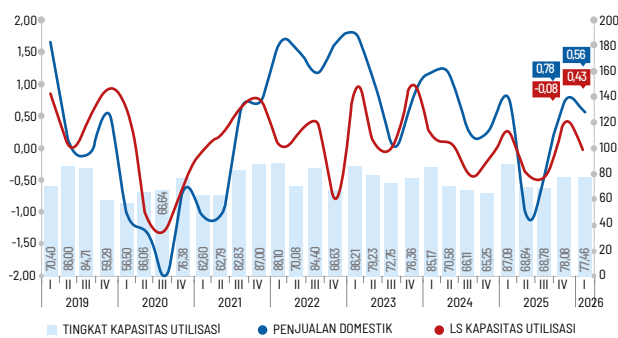
Tabel B1.1 Likert Scale Tahun TW I 2023 s.d TW I 2026 di Kepri

Indikator	2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
KONDISI SAAT INI													
Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20	0,29	0,78	-1,11	-0,33	0,78	0,56
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60	0,45	-0,40	-0,50	-0,44	0,08	-0,13
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45	-0,17	0,27	-0,45	-0,36	0,43	-0,08
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33	-0,40	0,18	0,00	-0,50	0,17	0,33
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58	0,67	0,82	0,73	0,58	0,57	1,08
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46	0,38	0,36	0,18	0,33	0,54	0,83
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15	0,09	0,27	0,45	0,58	0,21	1,08
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31	0,50	1,00	0,27	0,33	0,36	0,92
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58	-0,08	0,27	-0,18	0,17	0,07	0,17
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23	0,33	-0,09	-0,18	-0,58	0,00	0,42
PERKIRAAN KE DEPAN													
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08	0,92	0,36	0,55	0,17	0,71	0,92
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,71	2,00
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50	0,18	0,45	0,00	0,25	0,43	0,42
Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46	0,33	0,36	0,27	0,25	0,71	0,75
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82	0,83	0,82	0,64	0,75	0,64	0,42
Tingkat Kapasitas Utilisasi	86,21	79,23	72,75	76,36	85,17	70,58	66,11	65,25	87,09	68,64	68,78	78,08	77,46

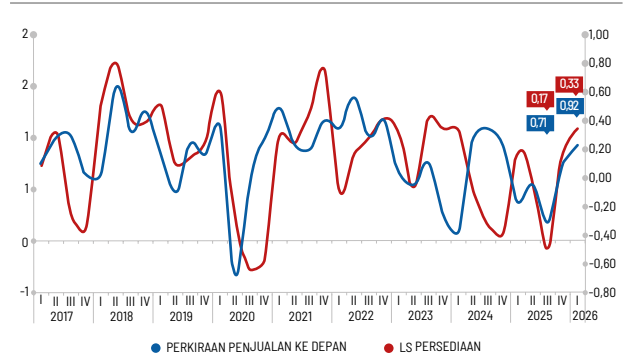
Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor turut mengalami penurunan. Kinerja ekspor yang berkontraksi ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor Industri Pengolahan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penurunan ekspor sektor Industri Pengolahan secara garis besar dipengaruhi oleh dinamika ketidakpastian geopolitik global dan implementasi kebijakan tarif perdagangan AS. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan permintaan ekspor, penyesuaian target pasar dan rute pengiriman yang disebabkan penutupan Selat Hormuz, serta tekanan pada harga yang menyebabkan harga menjadi kurang bersaing. Sementara itu, kenaikan harga tiket feri pascapandemi, menyebabkan kinerja ekspor sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum semakin menurun. Pengunjung yang hampir setengahnya merupakan wisatawan mancanegara dan sebagian besar berasal dari Singapura, Malaysia dan negara ASEAN lainnya, mengalami penurunan pasca ditetapkannya kenaikan harga tiket feri.

Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 77,46%, menurun dari periode sebelumnya tercermin dari *likert scale* kapasitas utilisasi yang berkontraksi sebesar -0,08, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terakselerasi sebesar 0,43 (Grafik B1.1). Penurunan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Menurunnya tingkat kapasitas utilisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan penjualan, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor sebagai dampak dari penurunan permintaan pada sektor Industri Pengolahan. Sementara itu, penurunan jumlah tamu berkunjung yang menyebabkan penurunan okupansi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disebabkan oleh pergeseran HBKN triwulan I yang jatuh berdekatan dengan HBKN triwulan sebelumnya, sehingga pengunjung cenderung berlibur pada salah satu HBKN. Pada sektor Akomodasi dan Makan Minum, kenaikan harga tiket feri turut berpengaruh pada penurunan tingkat okupansi perusahaan.

Di sisi lain, pada Grafik B1.2 tingkat persediaan mengalami peningkatan tercermin dari *likert scale* sebesar 0,33, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 0,17. Level persediaan yang meningkat



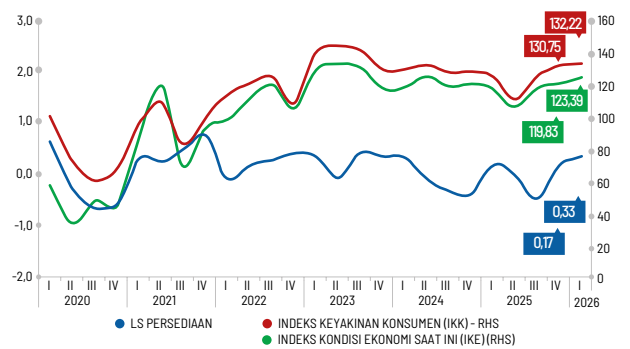
Grafik B1.1 Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik



Grafik B1.2 LS Persediaan & LS Perkiraan Penjualan ke Depan

tersebut terjadi seiring dengan optimisme prakiraan penjualan ke depan, ditunjukkan dengan peningkatan *likert scale* triwulan I 2026 sebesar 0,92, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada angka 0,71. Peningkatan persediaan searah dengan peningkatan prakiraan penjualan ke depan guna mengantisipasi kenaikan harga bahan baku, ketidakpastian kondisi global, serta menyambut *peak season* permintaan khususnya pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Peningkatan persediaan juga searah dengan kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 132,22, meningkat dibanding triwulan IV 2025 yakni 130,75 serta Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 123,39, terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 119,83 (Grafik B1.3). Hal ini mencerminkan adanya penguatan daya beli dan arah permintaan masyarakat, sehingga mendorong pelaku industri untuk menambah level persediaan untuk menjaga kelancaran penjualan.



Grafik B1.3 LS Persediaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE)

Secara umum, investasi pada periode ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercermin dari *likert scale* investasi 1,08 pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 0,57. Hal ini terkonfirmasi dari indeks konsumsi barang kebutuhan tahan lama hasil Survei Konsumen (SK) yang turut mengalami peningkatan dari 115,83 pada triwulan sebelumnya menjadi 119,50 pada triwulan ini. Peningkatan investasi

tersebut utamanya didorong oleh upaya perusahaan dalam melakukan *upgrade* mesin dan fasilitas pendukung, penambahan fasilitas seiring proses relokasi pabrik, serta ekspansi kapasitas produksi melalui penambahan gedung, mesin, dan warehouse, khususnya pada sektor Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Meskipun tren permintaan, baik domestik maupun ekspor, belum terlihat mengalami peningkatan, kenaikan investasi yang terjadi saat ini mencerminkan langkah antisipatif perusahaan terhadap potensi permintaan ke depan. Hal ini sejalan dengan karakteristik sebagian besar perusahaan, khususnya di sektor Industri Pengolahan, yang menggunakan *fiscal year* dengan periode awal tahun buku dimulai pada April 2026, sehingga realisasi peningkatan permintaan belum sepenuhnya tercermin pada periode saat ini. Dengan demikian, peningkatan investasi yang telah dilakukan lebih merupakan bentuk persiapan untuk mengakomodasi proyeksi kenaikan permintaan di periode mendatang. Kondisi ini turut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) serta Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dalam 6 bulan ke depan yang mengindikasikan adanya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, langkah ekspansi dunia usaha berpotensi selaras dengan peningkatan permintaan ke depan, sehingga mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi akan mengalami penguatan secara bertahap.

Harga jual pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale* sebesar 0,92, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,36. Peningkatan harga jual/tarif terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, *Real Estate*, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Meningkatnya harga jual pada sektor-sektor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya tenaga kerja yang berdampak signifikan mengingat mayoritas kontak *liaison* merupakan industri padat karya seperti jasa maklon. Di samping itu, beberapa perusahaan di sektor industri pengolahan, *real estate*, dan konstruksi turut menginformasikan bahwa kenaikan biaya bahan baku turut berperan dalam peningkatan harga jual sejalan dengan kenaikan biaya operasional dan kondisi pasar.

Seiring dengan meningkatnya harga jual, margin perusahaan turut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale* margin pada triwulan I 2026 sebesar 0,17, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,07. Peningkatan margin terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada sektor Industri Pengolahan, peningkatan tersebut didorong oleh penerapan sistem *cost plus margin* yang banyak digunakan oleh perusahaan industri padat karya, seperti jasa maklon. Dalam sistem ini, harga jual ditentukan berdasarkan total biaya produksi yang timbul ditambah persentase margin keuntungan. Sementara itu, peningkatan margin pada sektor Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari sisi nominal didorong oleh peningkatan harga jual, sementara dari sisi persentase, margin tetap dijaga pada tingkat yang relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perkembangan jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan pada triwulan I 2026 khususnya pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tercermin dari nilai *likert scale* sebesar 0,42, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada angka 0,00. Akselerasi tenaga kerja disebabkan adanya pergeseran *festive moments* atau HBKN yang jatuh pada triwulan I 2026 dan siklus permintaan pasar Industri Pengolahan. Peningkatan tenaga kerja tidak disertai dengan kenaikan biaya tenaga kerja yang stabil di angka 2,00 disebabkan tambahan pekerja umumnya berasal dari segmen berupah lebih rendah (*outsourcing* atau *daily worker*), diiringi strategi efisiensi perusahaan seperti digitalisasi dan automasi, serta penjagaan tingkat upah menyesuaikan UMK, sehingga total biaya tenaga kerja tidak meningkat signifikan meskipun jumlah pekerja bertambah. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, peningkatan UMK pada tahun 2026 rata-rata sebesar 7,06%. Di sisi lain, perusahaan juga mengoptimalkan sumber daya dari program magang pemerintah dengan biaya tenaga kerja dibayarkan oleh pemerintah.

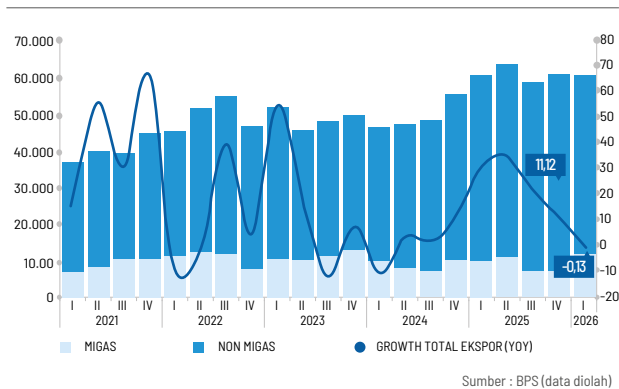




BOKS 2

Dinamika Ekspor Produk Elektronik Kepri di tengah Tekanan Rantai Pasok dan Kebijakan Perdagangan Global

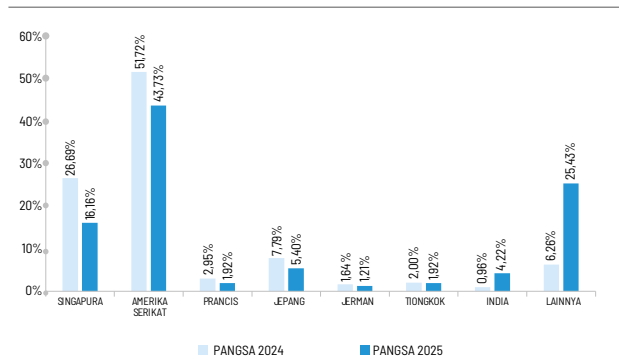
Kinerja ekspor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 menunjukkan resiliensi yang terjaga meskipun terkontraksi 0,31% (yoy) di tengah dinamika tantangan global. Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dengan pangsa sekitar 80% terhadap total ekspor. Berdasarkan data BPS, struktur ekspor nonmigas Kepri masih didominasi oleh komoditas produk elektronik yang tergolong dalam klasifikasi **HS 85 (Mesin dan Peralatan Listrik serta Bagiannya)** dengan pangsa sebesar 49,25% terhadap total ekspor pada Maret 2026.



Grafik B2.1 Ekspor Migas dan Non Migas Kepri

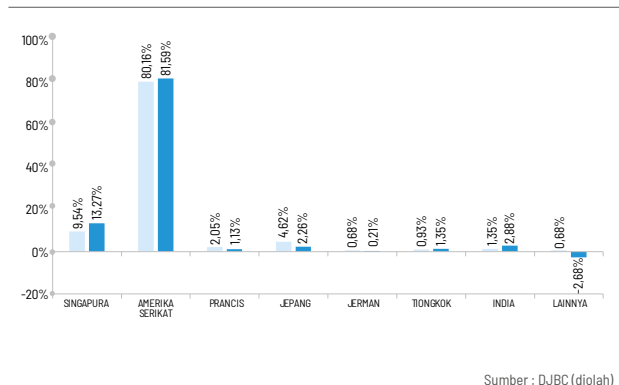
Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor HS 85 Kepri, dengan total pangsa nominal dan volume pada tahun 2025 sebesar 43,73% dan 81,59% meskipun cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya konsentrasi ekspor HS 85 Kepri ke pasar Amerika Serikat, sehingga terdapat risiko kerentanan terhadap kinerja ekspor apabila terkait dengan pelemahan permintaan, disrupsi rantai pasok, atau perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor.

Secara bulanan, ekspor HS 85 Kepri ke Amerika Serikat masih tumbuh positif pada Januari dan Februari 2026, baik dari sisi nominal maupun volume. Nilai ekspor masing-masing tumbuh sebesar 42,87% (yoy) dan 11,64% (yoy), sementara volume ekspor tumbuh lebih tinggi,



Sumber : DJBC (diolah)

Grafik B2.2 Pangsa Nominal Ekspor HS 85



Sumber : DJBC (diolah)

Grafik B2.3 Pangsa Nominal Ekspor HS 85

yaitu sebesar 64,21% (yoy) dan 61,69% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan masih terjaganya aktivitas produksi dan pengiriman produk elektronik pada awal tahun. Namun, pertumbuhan volume yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nominal mengindikasikan moderasi unit value ekspor.

Pada Maret 2026, kinerja ekspor HS 85 Kepri ke Amerika Serikat mulai tertahan. Nilai ekspor terkontraksi sebesar 34,85% (yoy), sementara volume ekspor turun sebesar 8,72% (yoy). Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja ekspor HS 85 ke Amerika Serikat pada

Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,13% (yoy). Pelemahan ini mengindikasikan peningkatan tekanan dari sisi penawaran dan hambatan non tarif yang spesifik pada industri yang berorientasi ekspor HS 85 di Kepri.

Periode	Nominal Ekspor HS85 ke AS		Volume Ekspor HS 85 ke AS	
	Nilai (Miliar USD)	Growth% (yoy)	Volume (juta ton)	Growth% (yoy)
Januari 2026	34,53	42,87% (yoy)	3.728,80	64,21%
Februari 2026	29,03	11,64% (yoy)	3.735,02	61,69%
Maret 2026	24,72	-34,85% (yoy)	3.117,92	-8,72%

Sumber: DJBC

Dari sisi penawaran, hasil liaison Bank Indonesia mengindikasikan bahwa pelaku industri elektronik di Kepri menghadapi tekanan akibat keterbatasan pasokan komponen, khususnya semikonduktor dan *chip* memori. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena *global memory crunch*, yaitu meningkatnya permintaan *chip* untuk kebutuhan infrastruktur *artificial intelligence (AI)* dan pusat data, yang mendorong realokasi kapasitas produksi global ke segmen dengan margin lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya *Bill of Materials (BOM)* dan menekan margin pelaku usaha manufaktur elektronik. Sedangkan dari sisi permintaan, pelemahan pasar perangkat teknologi global turut menjadi faktor yang perlu dicermati. Laporan IDC Worldwide Tracker mencatat pengiriman *smartphone* global pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar 2,9% (yoy). Kelangkaan *chip* turut memberikan tekanan kenaikan harga komponen dan peningkatan *average selling price (ASP)* yang berpotensi mendorong konsumen memperpanjang siklus penggantian perangkat, sehingga menahan permintaan terhadap produk elektronik baru. Kondisi ini akan berdampak pada permintaan ekspor produk elektronik Kepri, terutama yang terkait dengan rantai nilai perangkat teknologi.

Selain faktor pasokan dan permintaan, kinerja ekspor elektronik Kepri juga menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Pengetatan ketentuan *rules of origin (RoO)* pada produk teknologi tinggi perlu diantisipasi dengan kelengkapan pembuktian asal barang, terutama bagi produk yang masih memiliki kandungan komponen perantara dari Tiongkok. Di sisi lain, kebijakan *Countervailing Duties (CVD)* yang diberlakukan otoritas Amerika Serikat terhadap produk *crystalline silicon photovoltaic cells* asal Indonesia dengan penerapan *preliminary tariff* berkisar antara 86% hingga 143%

juga menjadi risiko tambahan, meskipun dampaknya lebih bersifat spesifik pada subkomoditas tertentu dalam kelompok HS 85.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, upaya menjaga resiliensi ekspor elektronik Kepri perlu diarahkan pada penguatan daya saing struktural. Pelaku industri perlu didorong melakukan diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada sumber komponen tertentu, memperkuat kepatuhan terhadap dokumen kepabeanaan dan ketentuan asal barang. Selain itu, diversifikasi pasar tujuan ekspor juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada pasar negara tertentu untuk mitigasi risiko volatilitas kebijakan perdagangan dan tekanan permintaan.

BAB 2

Perkembangan Keuangan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw I
2026

21,56%
Rp2,84 T



Tw I
2025

21,75%
Rp3,22 T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw I
2026

15,41%
Rp2,15 T



Tw I
2025

16,16%
Rp2,48 T

Realisasi Belanja APBN



Tw I
2026

20,77%
Rp3,21T



Tw I
2025

16,02%
Rp2,62T



Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan I 2026 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan yang terjadi pada seluruh pos yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.



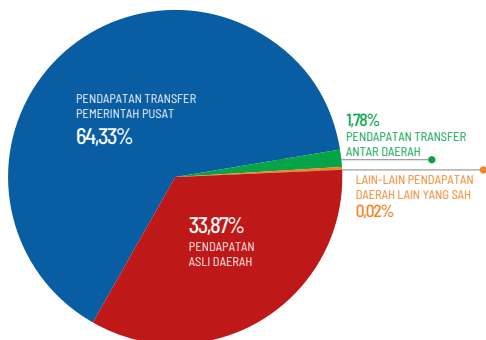
Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan I 2026 tercatat sebesar 21,56%, sementara realisasi belanja mencapai 15,41% dari target pagu anggaran. Realisasi pendapatan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,75%. Realisasi belanja juga tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 16,16%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos PAD, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, realisasi pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I 2025. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja disebabkan oleh penurunan pada seluruh pos belanja yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di Kepri pada triwulan I 2026 mencapai 21,56% dari pagu anggaran atau sebesar Rp2,84 triliun.

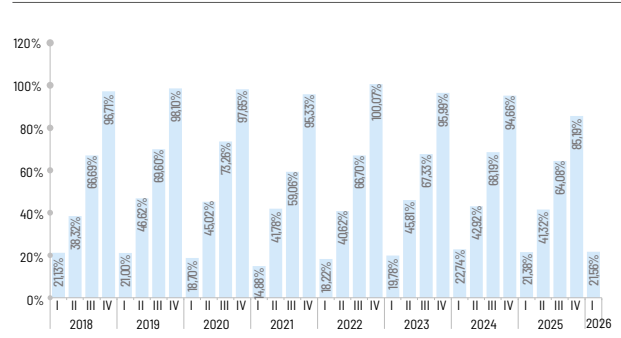
Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 21,75% dari pagu anggaran atau sebesar Rp3,22 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari melemahnya realisasi pada pos PAD, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya persentase realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan I 2026 mencapai Rp1,82 triliun atau sebesar 27,59% dari pagu anggaran. Komponen ini memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 50,27% dari pagu anggaran dengan capaian realisasi terbesar yaitu mencapai 64,33% dari total realisasi. Secara persentase, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 22,43% dari pagu. Namun demikian, dari sisi nominal, realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp1,92 triliun pada triwulan I 2025 menjadi Rp1,82 triliun pada triwulan I 2026.



Sumber : DJPK Kemenkeu (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan I 2026



Sumber : DJPK Kemenkeu (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan I 2026

Realisasi PAD pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan I 2026 tercatat sebesar 16,26%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat 20,75% dari pagu anggaran. Secara nominal, realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,17 triliun menjadi sebesar Rp962,69 miliar pada triwulan I 2026. Penurunan realisasi terutama disebabkan oleh penurunan pos anggaran Pajak Daerah, pos Retribusi Daerah, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Pajak Daerah menurun dari Rp932,12 miliar dari pagu sebesar Rp4,60 triliun pada triwulan I 2025 menjadi Rp820,31 miliar dari pagu sebesar Rp4,78 triliun pada triwulan I 2026. Lebih lanjut, realisasi pada pos Retribusi Daerah menurun menjadi Rp89,96 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp841,99 miliar pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang terealisasi 20,12% atau Rp131,90 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp655,51 miliar. Capaian realisasi pos Lain-lain PAD yang Sah turut mengalami penurunan dari Rp104,32 miliar atau 30,48% dari pagu sebesar Rp342,27 miliar menjadi Rp49,76 miliar atau 19,29% dari pagu sebesar Rp257,92 miliar.

Penurunan capaian PAD yang lebih rendah tertahan akibat peningkatan realisasi pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan yang tercatat Rp2,66 miliar atau sebesar 6,86% dari pagu anggaran sebesar Rp38,78 miliar, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,38 miliar atau 6,27% dari pagu sebesar Rp37,94 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan penerimaan deviden seiring membaiknya kinerja keuangan perusahaan daerah dan optimalisasi pengelolaan modal pemerintah daerah.

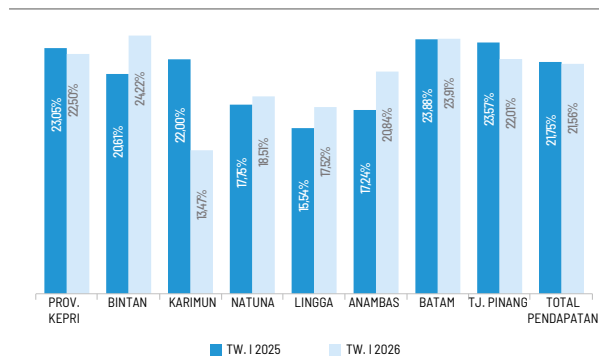
Berdasarkan wilayah kewenangan, persentase realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2026 dicapai Pemerintah Kabupaten Bintan dengan realisasi sebesar 24,22% dari pagu anggaran atau sebesar Rp247,63 miliar. Capaian realisasi berikutnya pada Kota Batam sebesar Rp1 triliun atau 23,91% dari pagu. Pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 35,21% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri paling tinggi dibandingkan persentase realisasi pendapatan daerah lain di Kepulauan Riau. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Provinsi Kepri sebesar Rp745,32 miliar atau 22,50% dari pagu anggaran tahun ini.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan I 2026

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur(%)	Rp	Realisasi(%)	Porsi(%)
Pendapatan Asli Daerah	5.920,58	44,91%	962,69	16,26%	33,87%
Pajak Daerah	4.781,89	36,27%	820,31	17,15%	
Retribusi Daerah	841,99	6,39%	89,96	10,68%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	38,78	0,29%	2,66	6,86%	
Lain-lain PAD yang Sah	257,92	1,96%	49,76	19,29%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.626,51	50,27%	1.828,44	27,59%	64,33%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	615,30	4,67%	50,48	8,20%	1,78%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,24	0,15%	0,66	3,26%	0,02%
Hibah	1,34	0,01%	0,00	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	18,90	0,14%	0,66	3,49%	
TOTAL PENDAPATAN	13.182,63	100,00%	2.842,27	21,56%	

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah)

Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 21,56% dari pagu anggaran.



Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda Kepri sampai dengan triwulan I 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan I 2026 mencapai 15,41% dari pagu anggaran atau sebesar Rp2,15 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 16,16% dari pagu anggaran atau sebesar Rp2,48 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara persentase terjadi pada seluruh pos yakni pos Belanja Operasi, pos Belanja Modal, pos Belanja Tidak Terduga, dan pos Belanja Transfer. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 91,63%, diikuti Belanja Transfer sebesar 5,54%, Belanja Modal sebesar 2,82%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,02%. Secara nominal, total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2026 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp13,97 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp15,36 triliun. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2026.

Realisasi Belanja Operasi tercatat 17,58% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,97 triliun. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 17,91% atau Rp2,12 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi didominasi pos Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar dengan porsi 68,07% dari total realisasi anggaran, mencapai 21,96% dari pagu anggaran atau sebesar Rp1,46 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1,31 triliun atau 20,16% dari pagu. Sementara penurunan realisasi pos Belanja Operasi utamanya didorong oleh penurunan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar Rp421 miliar atau 10,63% dari pagu, pos Belanja Hibah sebesar Rp84,42 miliar atau 16,76% dari pagu, dan pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,36 miliar atau 3,89% dari pagu. Hal ini mengindikasikan penggunaan biaya untuk belanja barang dan jasa mengalami efisien, sejalan dengan realokasi belanja daerah.

Persentase realisasi Belanja Modal pada triwulan I 2026 tercatat 3,54% dari pagu anggaran, tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 4,81%. Secara nominal pagu pos Belanja Modal sebesar Rp1,71 triliun pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat Rp2,13 triliun. Pangsa realisasi Pos Belanja Modal sebesar 2,82% terhadap seluruh pos anggaran belanja atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 4,13%. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan I 2026 secara nominal tercatat melandai yakni sebesar Rp60,63 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp102,5 miliar. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

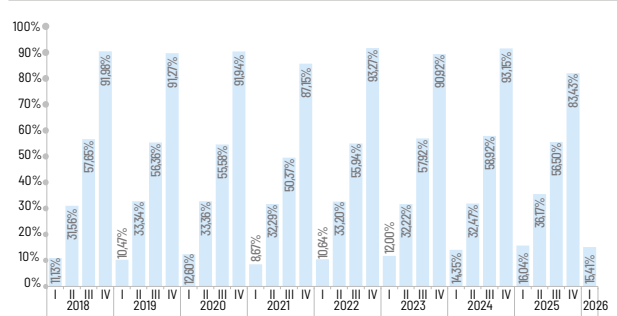
Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan I 2026 tercatat Rp987,18 miliar, lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan I 2025 yang tercatat Rp1,30 triliun. Realisasi Belanja Transfer pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp119,28 miliar atau 12,08% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp255,04 miliar atau 19,58% dari pagu anggaran.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan I 2026

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	11.218,38	80,29%	1.972,58	17,58%	91,63%
Belanja Pegawai	6.674,70	47,77%	1.465,52	21,96%	
Belanja Barang dan Jasa	3.962,80	28,36%	421,26	10,63%	
Belanja Bunga	33,09	0,24%	0,00	0,00%	
Belanja Subsidi	9,03	0,06%	0,02	0,22%	
Belanja Hibah	503,78	3,61%	84,42	16,76%	
Belanja Bantuan Sosial	34,98	0,25%	1,36	3,89%	
Belanja Modal	1.713,18	12,26%	60,63	3,54%	2,82%
Belanja Tidak Terduga	53,47	0,38%	0,37	0,69%	0,02%
Belanja Transfer	987,18	7,07%	119,28	12,08%	5,54%
Belanja Bagi Hasil	530,96	3,80%	60,70	11,43%	
Belanja Bantuan Keuangan	456,22	3,27%	58,58	12,84%	
TOTAL BELANJA	13.972,21	100,00%	2.152,86	15,41%	
SURPLUS/DEFISIT	-789,58		689,41		
Pembiayaan Neto	789,58		34,38	4,35%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	860,81		34,38	3,99%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	71,23		0,00	0,00%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00		723,79		

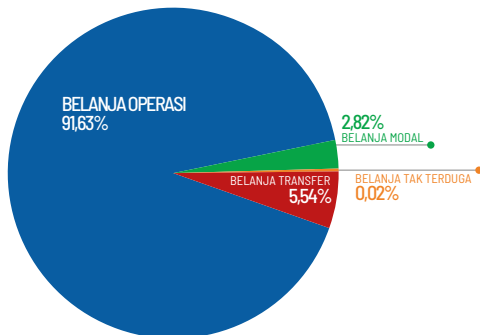
Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

Hal ini dipengaruhi oleh penurunan realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil yang tercatat 11,43% atau sebesar Rp60,70 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,48% atau Rp132,57 miliar, serta penurunan realisasi pada pos Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat 12,84% atau sebesar Rp58,58 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,52% atau Rp122,47 miliar. Perkembangan ini mengindikasikan adanya penyesuaian dan efisiensi pada pos belanja transfer, sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran dan penajaman prioritas belanja daerah.



Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

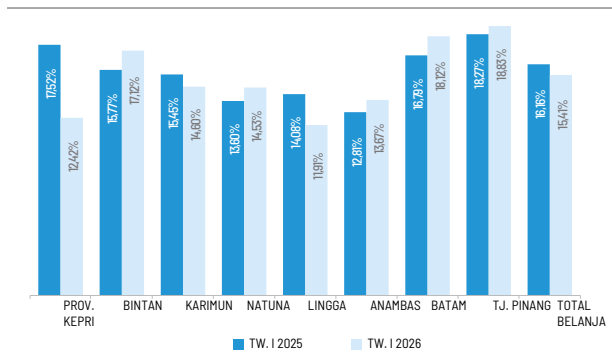
Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan I 2026



Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan I 2026

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi belanja pada triwulan I 2026 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 15,41% dari pagu anggaran. Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kota Tanjungpinang, diikuti Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Capaian realisasi Kota Tanjungpinang tercatat 18,83% dari pagu anggaran atau sebesar Rp194,43 miliar. Lebih lanjut, capaian realisasi belanja Kota Batam tercatat sebesar Rp779,15 miliar atau 18,12% dari pagu anggaran dan capaian realisasi belanja Kabupaten Bintan tercatat sebesar Rp181,12 miliar atau sebesar 17,12% dari pagu anggaran. Berdasarkan pangsa realisasi belanja, Kota Batam memiliki pangsa terbesar terhadap seluruh pemerintah daerah di Kepri dengan pangsa sebesar 36,19%.



Sumber : DJPK Kemenkeu (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Pada tahun 2026, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun pagu belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2025 sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2026, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp23,63 triliun dari Rp18,05 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, pagu Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp15,45 triliun dari Rp16,40 triliun pada tahun 2025. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp20,42 triliun dari sebesar Rp15,38 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan pagu Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp6,27 triliun pada tahun 2026 dari Rp8,05 triliun pada tahun 2025.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan I 2026 tercatat 13,00%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 12,71% dari pagu anggaran. Peningkatan persentase realisasi ini utamanya terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan yang antara lain mengindikasikan masih kuatnya aktivitas ekonomi daerah yang berdampak pada perluasan basis pajak dan peningkatan penerimaan PPh maupun PPN. Persentase realisasi pada pos Penerimaan Perpajakan tercatat 11,94% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 10,65% dari pagu. Sementara itu, realisasi pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat 19,73% pada triwulan I 2026, lebih rendah dari triwulan I 2025 sebesar 24,57%. Lebih lanjut, secara nominal realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar Rp3,07 triliun pada triwulan I 2026, meningkat dari triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp2,29 triliun sejalan dengan peningkatan target pendapatan APBN. Peningkatan target pendapatan tersebut mencerminkan ekspektasi pemerintah terhadap perbaikan aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat mendorong penerimaan negara.

Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2026, secara umum penerimaan pajak tumbuh 48,85% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada pos Pajak Dalam Negeri yang tercatat Rp2,43 triliun dan pos Pajak Penghasilan yang tercatat sebesar Rp1,70 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Di sisi lain, terdapat dua komponen penerimaan yang tercatat mengalami penurunan pada triwulan I 2026 yaitu realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi Cukai yang lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun dari Rp 667,45 miliar atau 24,57% dari pagu pada triwulan I 2025 menjadi Rp634,01 miliar atau 19,73% dari pagu pada triwulan I 2026. Hal ini disebabkan oleh penerimaan PNBP Lainnya yang tercatat Rp203,54 miliar pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat Rp234,03 miliar. Sementara itu, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pada Pendapatan BLU yang tercatat Rp430,47 miliar atau 16,35% dari target atau tumbuh 1,66% (yoy).

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan I 2026 mencapai 20,77% dari pagu atau sebesar Rp3,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 16,02% dari pagu atau sebesar Rp2,62 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan I 2026 meningkat sebesar 22,16% (yoy) utamanya didorong oleh pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing mencapai 13,38% dan 31,58% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang masing-masing tercapai 12,47% dan 19,71% dari pagu anggaran. Peningkatan komponen Belanja Pemerintah Pusat terutama terjadi pada Belanja Modal yang tumbuh 141,99% (yoy), disusul Belanja Pegawai yang tumbuh sebesar 17,15% (yoy) dan Belanja Barang yang tumbuh 11,77% (yoy). Di samping itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan I 2026 turut mengalami peningkatan sebesar 24,98% (yoy) terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh sebesar 42,82% (yoy), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang tumbuh 35,66% (yoy). Meski demikian, terjadi penurunan nominal realisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Desa yang berturut-turut berkontraksi sebesar 52,28% (yoy) dan 80,40% (yoy). Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor administratif dan pergeseran prioritas anggaran.

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

Uraian	2025 (Miliar Rp)			2026 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
	Pagu	Realisasi Triwulan I 2025	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan I 2026	% Realisasi	
A. Pendapatan Negara	18.057,64	2.295,71	12,71%	23.634,65	3.072,51	13,00%	33,84%
I Penerimaan Perpajakan	15.381,79	1.638,26	10,65%	20.420,72	2.438,50	11,94%	48,85%
1 Pajak Dalam Negeri	14.945,52	1.391,25	9,31%	19.765,79	2.164,86	10,95%	55,61%
a. Pajak Penghasilan	10.927,67	1.178,00	10,78%	15.470,31	1.704,04	11,01%	44,66%
b. Pajak Pertambahan Nilai	3.960,47	-91,16	-2,30%	3.820,12	126,98	3,32%	239,29%
c. Pajak Bumi dan Bangunan	13,41	0,17	1,24%	12,93	-1,29	-9,95%	-876,50%
d. Cukai	33,30	9,51	28,56%	53,62	6,43	11,99%	-32,43%
e. Pajak Lainnya	10,66	294,73	2764,33%	408,81	328,70	80,40%	11,52%
2 Pajak Perdagangan Internasional	436,28	247,01	56,62%	654,93	273,65	41,78%	10,78%
II PNPB	2.675,85	657,45	24,57%	3.213,93	634,01	19,73%	-3,57%
1 Pendapatan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Pendapatan BLU	2.153,28	423,42	19,66%	2.633,02	430,47	16,35%	1,66%
4 PNPB Lainnya	522,57	234,03	44,78%	580,91	203,54	35,04%	-13,03%
III Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B. Belanja Negara	16.403,89	2.628,34	16,02%	15.458,14	3.210,77	20,77%	22,16%
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.352,73	1.041,85	12,47%	9.179,79	1.227,95	13,38%	17,86%
1 Belanja Pegawai	2.442,23	600,79	24,60%	2.745,04	703,84	25,64%	17,15%
2 Belanja Barang	4.252,55	408,68	9,61%	3.803,66	456,79	12,01%	11,77%
3 Belanja Modal	1.399,95	27,82	1,99%	2.394,43	67,32	2,81%	141,99%
4 Belanja Bansos	11,15	4,56	40,91%	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
5 Belanja Lainnya	246,86	0,00	0,00%	236,65	0,00	0,00%	0,00%
II. Transfer ke Daerah (TKD)	8.051,16	1.586,49	19,71%	6.278,35	1.982,82	31,58%	24,98%
1 Dana Bagi Hasil	1.172,77	124,23	10,59%	439,26	59,29	13,50%	-52,28%
2 DAU	4.840,15	978,80	20,22%	4.303,63	1.397,97	32,48%	42,82%
3 DAK Fisik	274,91	0,00	0,00%	21,42	0,00	0,00%	0,00%
4 DAK Non Fisik	1.427,80	371,20	26,00%	1.436,29	503,56	35,06%	35,66%
5 Dana Desa	218,00	112,26	51,50%	77,76	22,01	28,30%	-80,40%
6 Transfer Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7 Dana Insentif Daerah	117,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8 Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
C. SURPLUS/(DEFISIT)	1.653,75	-332,62	-20,11%	8.176,51	-138,25	-1,69%	

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri



BAB 3

Inflasi

Provinsi Kepri (yoy)



Tw I
2026

3,23%

Tw IV
2025

3,47%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw I
2026

3,98%

Tw IV
2025

2,75%

Kota Batam (yoy)



Tw I
2026

3,13%

Tw IV
2025

3,68%

Kab. Karimun (yoy)



Tw I
2026

3,24%

Tw IV
2025

2,72%



Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan I 2026 masih berada dalam target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Inflasi Kepri Triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy).

Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh andil Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,11% (yoy), Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,98% (yoy), serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil 0,34% (yoy). Secara spasial, inflasi meningkat pada dua kota/kabupaten cakupan IHK sedangkan 1 kota IHK di Kepri mengalami penurunan inflasi. Inflasi di Kota Tanjungpinang tercatat 3,98% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 2,75% (yoy). Inflasi di Kabupaten Karimun tercatat sebesar 3,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,72% (yoy). Sementara itu, inflasi di Kota Batam tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yakni dari 3,68% (yoy) menjadi 3,13% (yoy). Pada periode yang sama, inflasi Nasional meningkat dari 2,92% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar 3,48% (yoy) pada Triwulan I 2026.

Secara bulanan, IHK Kepri pada triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,14% (mtm). Inflasi bulanan pada triwulan I 2026 terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 0,48% (mtm) dengan andil 0,13% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini didorong oleh meningkatnya harga udang basah, bayam, daging ayam ras, kacang panjang, dan sawi hijau. Peningkatan harga udang basah dan daging ayam ras sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat pada periode Ramadhan dan Idulfitri. Sementara itu, kenaikan harga sayuran seperti bayam, kacang panjang, dan sawi hijau didorong oleh pasokan yang terbatas seiring memasuki cuaca kemarau di Provinsi Kepri dengan hujan intensitas rendah hingga akhir Februari dan Maret yang berpotensi menghambat produksi pangan. Penyebab inflasi juga bersumber dari Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang tercatat inflasi sebesar 0,52% (mtm) dengan andil 0,05% (mtm), sejalan kenaikan harga nasi dengan lauk yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan baku pangan.

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflasi Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92	3,48
Inflasi Kepri	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47	3,23
Inflasi Tanjungpinang	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07	1,82	2,75	3,98
Inflasi Batam	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68	2,82	3,68	3,13
Inflasi Karimun					2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15	2,91	2,72	3,24

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri Maret 2026

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Udang Basah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.04
2	Bensin	Transportasi	0.04
3	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.03
4	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.03
5	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.02
6	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.02
7	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.02
8	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.02
9	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.02
10	Sigaret Kretek Mesin (Skm)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.02

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Maret 2026

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.09
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.09
3	Angkutan Udara	Transportasi	-0.05
4	Angkutan Laut	Transportasi	-0.04
5	Ketimun	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
6	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
7	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
8	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.01
9	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.01
10	Cabai Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.01

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.4 Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Maret 2026

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1.05
2	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.24
3	Angkutan Udara	Transportasi	0.22
4	Beras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.20
5	Tarif Listrik	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.18
6	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.15
7	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan dan Minuman	0.14
8	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.12
9	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0.08
10	Daging Sapi	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0.07

Sumber: BPS (data diolah)

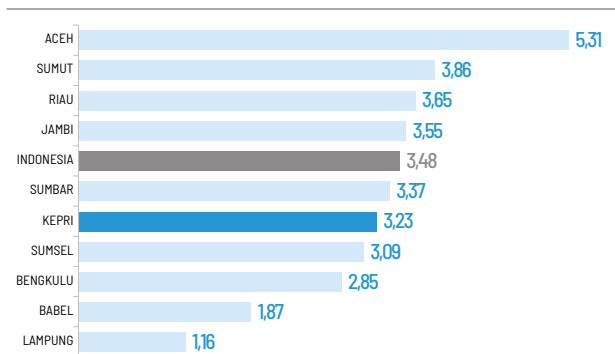
Tabel 3.5 Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Maret 2026

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% ,mtm)
1	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.16
2	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.09
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.05
4	Bensin	Transportasi	-0.05
5	Angkutan Laut	Transportasi	-0.05
6	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.03
7	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
8	Terong	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
9	Susu Bubuk	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02
10	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0.02

Sumber: BPS (data diolah)

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, peningkatan tekanan inflasi Kepri pada Triwulan I 2026 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat inflasi 16,88% (yoy) dengan andil 1,11% (yoy). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut mengalami inflasi 3,32% (yoy) dengan andil 0,98% (yoy). Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga mengalami inflasi 2,18% (yoy) dengan andil 0,34% (yoy).



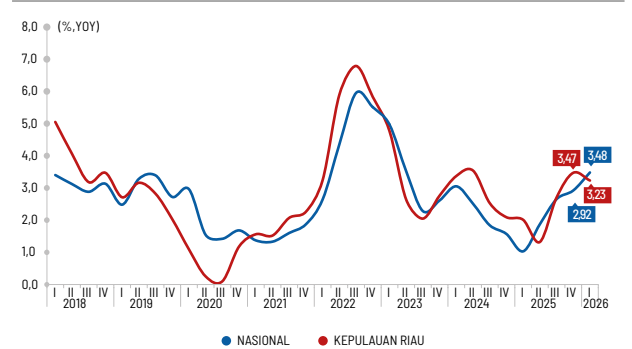
Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan I 2026 Regional Sumatera (% yoy)

Tabel 3.6 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% ,yoy)

No	Kelompok	2024				2025				2026									
		I		II		III		IV		I									
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi								
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46	0,69	2,31	-0,14	-0,48	1,42	4,86	1,49	5,07	0,98	3,32
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11	0,06	1,19	0,02	0,41	0,05	1,12	0,06	1,21	0,06	1,39
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65	0,25	1,61	0,45	2,84	0,17	1,04	0,16	0,99	0,34	2,18
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	-0,01	-0,18	0,01	0,21	0,02	0,54
5	Kesehatan	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24	0,01	0,52	0,03	1,07	0,04	1,66	0,04	1,79	0,05	1,95
6	Transportasi	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13	0,24	1,71	0,17	1,25	-0,09	-0,66	0,29	2,11	0,24	1,74
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,01	-0,12	-0,01	-0,09	0,00	-0,01	0,01	0,14
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38	0,01	0,73	0,01	0,54	0,01	0,53	0,01	0,33	0,03	1,73
9	Pendidikan	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84	-0,13	-1,87	-0,13	-1,84	0,09	1,40	0,09	1,37	0,10	1,45
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42	0,29	3,07	0,23	2,45	0,25	2,57	0,26	2,79	0,29	3,09
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53	0,61	10,03	0,69	11,06	0,78	12,40	1,06	16,68	1,11	16,88
	Umum		3,37		3,54		2,53		2,09		2,01		1,32		2,70		3,47		3,23

Sumber: BPS (data diolah)



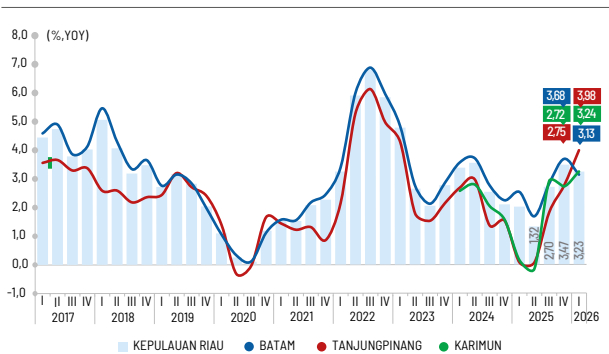
Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan I 2026 (% yoy)

Tekanan inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan andil sebesar 1,11% (yoy) disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan 1,05% (yoy) sejalan dengan tren meningkatnya harga emas global ditengah ketidakpastian global yang masih tinggi dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan. Inflasi pada kelompok Makanan Minuman dan Tembakau memberikan andil sebesar 0,98% (yoy) disebabkan oleh kenaikan harga daging ayam ras 0,24% (yoy), beras 0,20% (yoy), sigaret kretek mesin (skm) 0,15% (yoy), daging sapi 0,07% (yoy), dan telur ayam ras 0,06% (yoy). Sementara itu, inflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,34% (yoy) terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik 0,18% (yoy) sejalan dengan normalisasi pasca berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/ KABUPATEN

Secara spasial, ketiga Kota/Kabupaten IHK di Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada Triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,68% (yoy). Tekanan inflasi juga terjadi di



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

Kota Tanjungpinang dengan inflasi sebesar 3,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Kabupaten Karimun turut mencatatkan inflasi sebesar 3,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy).

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Secara tahunan, Kota Batam pada Triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 3,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,68% (yoy). Tekanan Inflasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 18,11% (yoy) dengan andil 1,16% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 18,03% (yoy) dengan andil 1,13% (yoy). Selain itu, inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,16% (yoy) dengan andil 0,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencatatkan inflasi 5,17% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mengalami inflasi sebesar 3,70% (yoy) dengan andil 0,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,38% (yoy) dengan andil 0,31% (yoy).

Secara bulanan, Kota Batam pada Maret 2026 tercatat inflasi sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan Desember 2025 sebesar 1,14% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi 0,56% (mtm) dengan andil 0,17% (mtm), didorong oleh kenaikan harga udang basah yang memberikan andil 0,04% (mtm), kacang panjang sebesar 0,03% (mtm); daging ayam ras sebesar 0,03% (mtm), bayam sebesar 0,03% (mtm), dan ikan kembung sebesar 0,02% (mtm). Tekanan inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,68% (mtm) dengan andil 0,06% (mtm) sejalan dengan kenaikan nasi dengan lauk sebesar 0,03% (mtm) dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki turut mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm) dengan andil 0,02% (mtm) disebabkan oleh kenaikan harga baju

kaos tanpa kerah / t-shirt anak sebesar 0,01% (mtm) sejalan dengan tingginya permintaan. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Transportasi yang masing - masing tercatat mengalami deflasi sebesar 0,09% (mtm) dan 0,05% (mtm).

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada Triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 3,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,75% (yoy). Tekanan inflasi tersebut didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang tercatat inflasi 9,66% (yoy) dengan andil 1,32% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami inflasi 0,68% (yoy) dengan andil 0,09% (yoy). Selain itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi 4,16% (yoy) dengan andil 1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 4,97% (yoy) dengan andil 1,41% (yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi 16,78% (yoy) dengan andil 1,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat inflasi 15,82% (yoy) dengan andil 0,99% (yoy).

Secara bulanan, Kota Tanjungpinang pada Maret 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,37% (mtm), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 1,28% (mtm). Deflasi terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami deflasi sebesar 0,74% (mtm) dengan andil -0,21% (mtm) disebabkan oleh penurunan harga cabai merah dengan andil -0,08% (mtm), ikan selar dengan andil -0,05% (mtm), sotong (segar) dengan andil -0,04% (mtm), bawang merah dengan andil -0,03% (mtm), dan cumi-cumi dengan andil -0,02% (mtm). Kelompok Transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52% (mtm) dengan andil -0,07% (mtm) disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara -0,08% (mtm) dan tarif angkutan laut -0,04% (mtm) sejalan dengan penetapan diskon tarif angkutan pada periode HBKN Idulfitri. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya mengalami deflasi 0,94% (mtm) dengan andil -0,06% (mtm) dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan dolar AS serta meningkatnya ekspektasi suku bunga akan tetap pada level tinggi sehingga mendorong investor untuk mengalihkan preferensinya ke aset safe haven seperti dolar AS. Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan dengan kenaikan beberapa komoditas antara lain beras, sawi hijau, telur ayam ras, mobil, dan bensin.

3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada Triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 3,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Tekanan inflasi tersebut didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi 3,62% (yoy)

Tabel 3.7 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% , yoy)

Periode	IV-2024			I-2025			II-2025			III-2025			IV-2025			I-2026		
	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,77	0,47	0,31	-0,04	-0,33	-0,53	1,40	1,17	1,88	1,48	1,42	1,68	0,92	1,20	1,36	0,92	1,20	1,36
Pakaian dan Alas Kaki	0,12	-0,39	0,07	0,09	-0,49	0,07	0,12	-0,47	0,15	0,11	-0,38	0,17	0,09	-0,25	0,27	0,09	-0,25	0,27
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,55	-0,90	-0,73	0,56	0,09	-0,11	0,19	0,09	0,03	0,18	0,10	0,02	0,16	1,32	0,67	0,16	1,32	0,67
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,01	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,08	0,00	-0,03	-0,07	0,01	-0,01	0,00	0,03	0,00	-0,01	0,03	0,00	-0,01
Kesehatan	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05	0,01	0,05	0,05	0,01	0,05	0,03	0,00	0,05	0,08	-0,03	0,05	0,08	-0,03
Transportasi	0,22	0,38	0,21	0,16	0,26	-0,11	-0,17	0,22	0,17	0,29	0,49	0,04	0,25	0,33	0,04	0,25	0,33	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,05	-0,01	0,00	0,05	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	-0,03	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
Pendidikan	-0,11	-0,11	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	0,09	0,13	0,06	0,10	0,08	0,06	0,09	0,12	0,06	0,09	0,12	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,31	0,12	0,33	0,24	0,04	0,42	0,27	0,02	0,28	0,31	0,02	0,18	0,34	0,02	0,24	0,34	0,02	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,66	0,46	0,35	0,74	0,56	0,34	0,84	0,66	0,47	1,12	0,99	0,62	1,16	1,09	0,65	1,16	1,09	0,65
Umum	2,53	0,07	0,15	1,68	0,07	-0,15	2,82	1,82	2,91	3,68	2,75	2,72	3,13	3,98	3,24	3,13	3,98	3,24

Sumber: BPS (data diolah)

dengan andil 1,36% (yoy) meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 4,42% (yoy) dengan andil 1,69% (yoy). Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi 5,97% (yoy) dengan andil 0,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,21% (yoy) dengan andil 0,02% (yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi 7,98% (yoy) dengan andil 0,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat inflasi 7,87% (yoy) dengan andil 0,62% (yoy).

Secara bulanan, inflasi pada Kabupaten Karimun secara tercatat sebesar 0,56% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi sebesar 1,27% (mtm) dengan andil 0,47% (mtm). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah dan udang basah dengan andil masing-masing sebesar 0,12% (mtm), bayam dengan andil 0,08% (mtm), ikan kembung dengan andil 0,06% (mtm), dan telur ayam ras dengan andil 0,05% (mtm). Lebih lanjut, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki turut mengalami inflasi sebesar 1,62% (mtm) dengan andil 0,10% (mtm) utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga baju muslim pria dan baju muslim wanita masing-masing sebesar 0,02% (mtm) sejalan dengan tingginya permintaan pada periode Ramadhan-Idulfitri. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada beberapa komoditas yaitu kacang panjang, bawang merah, bawang putih, angkutan laut, dan emas perhiasan.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan II 2026 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi nasional 2026 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada Triwulan II 2026 diperkirakan tetap terkendali dipengaruhi oleh pasokan berlanjutnya program-program

pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan, meskipun masih perlu dicermati risiko tekanan inflasi kedepan seperti peningkatan tarif angkutan udara seiring peningkatan harga komoditas global dan tingginya mobilisasi masyarakat pada periode liburan semester serta kenaikan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut dan faktor *base effect*.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Mei 2026, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,43% (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,06% (yoy). Inflasi pada Mei 2026 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 1,27% (mtm) dengan andil sebesar 0,37% (mtm) sejalan dengan berakhirnya masa panen di wilayah Sumatera bagian utara sehingga pemenuhan pasokan perlu didatangkan dari wilayah lain dengan biaya logistik yang cukup tinggi serta meningkatnya permintaan dan konsumsi komoditas pangan pada periode Idul Adha. Lebih lanjut, Kelompok Transportasi turut mengalami inflasi 0,25% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm) dipengaruhi oleh kenaikan tarif bensin, pelumas/oli mesin, dan angkutan laut disebabkan oleh penyesuaian tarif BBM non subsidi serta kenaikan biaya energi yang mendorong peningkatan biaya operasional transportasi dan distribusi. Di sisi lain, inflasi bulanan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan udara, udang basah, dan ikan layang/ikan benggol. Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan koreksi harga emas global dan pergeseran preferensi investor ke aset lain. Sementara itu harga daging ayam ras, udang basah, dan ikan layang/ikan benggol mengalami penurunan dipengaruhi oleh pasokan yang terkendali. Tarif angkutan udara mengalami penurunan disebabkan oleh normalisasi harga pasca kenaikan tarif pada bulan sebelumnya.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh *base effect* realisasi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2025. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2026 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik yang mengakibatkan kenaikan ongkos distribusi; (ii) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga; (iii) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan ketidakpastian global; (iv) Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan; (v) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diperkirakan terkendali sejalan dengan diskon tarif tiket angkutan udara pada periode-periode HBKN serta normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk melalui strategi implementasi kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I 2026 antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di berbagai wilayah Provinsi Kepri hingga Maret 2026.
2. Pengendalian ekspektasi melalui sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
3. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Ramadhan-Idulfitri.
4. Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.

B. Ketersediaan Pasokan

1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi. Terdapat 9 (sembilan) KAD dengan skema *Business-to-Business* untuk komoditas bawang merah, beras, dan cabai
2. Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
3. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah.

C. Kelancaran Distribusi

1. Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2. Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.
3. Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan dalam rangka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

D. Komunikasi Efektif

1. *High Level Meeting* TPID dan TP2DD serta *High Level Meeting* Forkopimda Se-Provinsi Kepri.
2. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2026.
4. Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.
5. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2026 Kota Batam.
6. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2026.
7. Koordinasi pelaksanaan *Capacity Building* TPID dan KAD dengan daerah penghasil.
8. Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
9. Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidental. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, *talkshow* radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh

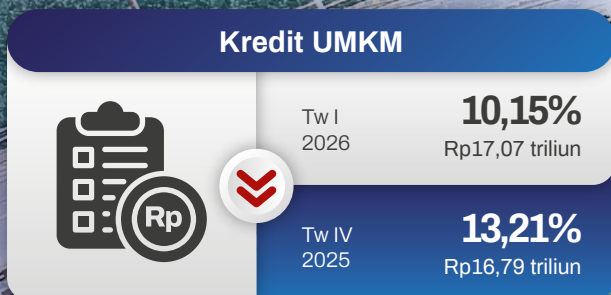
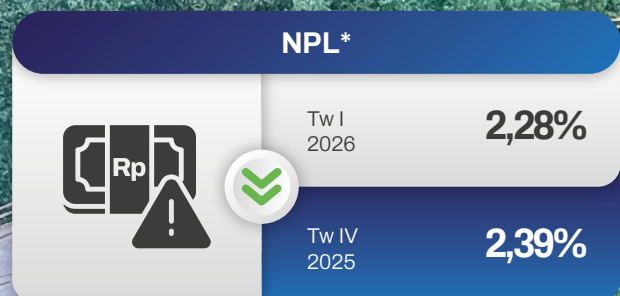
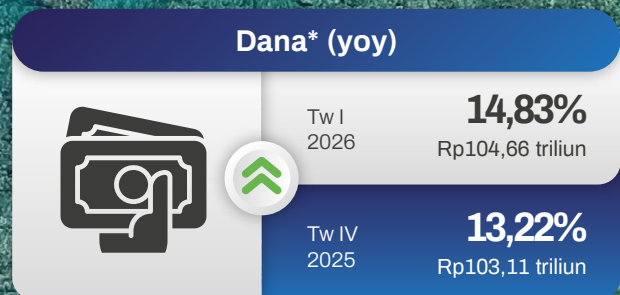
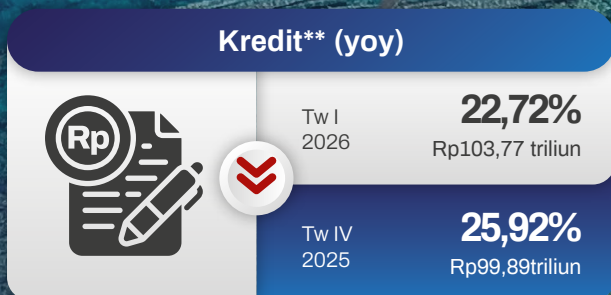
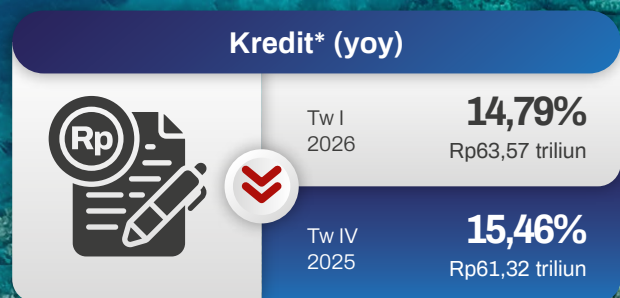
melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, penguatan neraca pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi . Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.

BAB 4

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM



* dari bank yang berlokasi di Kepri,
** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 secara umum tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan kualitas, di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang mengalami deselerasi. Melambatnya laju kredit tersebut diimbangi oleh akselerasi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta didukung oleh fungsi intermediasi yang tetap kuat tercermin dari Loan to Deposit Ratio/LDR dan risiko kredit (Non-Performing Loan/NPL) yang semakin terkendali



Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 mengalami deselerasi namun tetap tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya dan kualitas kredit yang semakin membaik. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 14,79% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 15,46% (yoy). Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 22,72% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,92% (yoy). Total aset perbankan di Kepri tercatat tumbuh sebesar 13,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,92% (yoy). Di sisi penghimpunan dana, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 14,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,22% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Kepri tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri tercatat sebesar 99,15%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 96,87%. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh membaiknya kualitas kredit, tercermin dari *NPL gross* yang tercatat sebesar 2,28%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,39%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM turut mengalami deselerasi, namun tetap tumbuh positif disertai dengan risiko kredit yang menurun. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 10,15% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,21% (yoy). Deselerasi ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, yang pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 48,72% (yoy), menjadi tumbuh 27,68% (yoy) pada triwulan I 2026. Selain itu, perlambatan juga didorong oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tercatat tumbuh sebesar 0,33% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,91% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan kredit UMKM yang masih berada pada level dua digit menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor produktif tetap berlanjut.

4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 22,72% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 25,92% (yoy). Deselerasi ini terutama disebabkan oleh penyaluran kredit pada LU Listrik, Gas, dan Air, LU Konstruksi serta LU Real Estate, Sewaan, dan Jasa PT yang tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan laju penyaluran kredit sejalan dengan deselerasi kredit konsumsi dan kredit investasi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 13,10% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,92% (yoy). Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 14,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,22% (yoy). Peningkatan terutama terjadi pada giro, sementara tabungan dan deposito tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kualitas kredit tetap terjaga, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*rasio NPL gross*) yang tercatat sebesar 2,28%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,39% serta tetap di bawah ambang batas 5%.

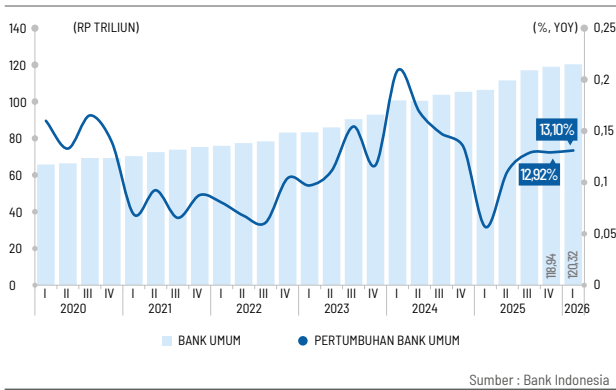
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 berjumlah Rp120,32 triliun atau tumbuh 13,10% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,92% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Persero yang tumbuh sebesar 18,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,65% (yoy). Di sisi lain, aset kelompok Bank Swasta dan BPD mengalami deselerasi yang masing-masing tumbuh sebesar 9,06% (yoy) dan 1,03% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,40% (yoy) dan 6,16% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 49,76%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (44,97%), dan BPD (5,27%).

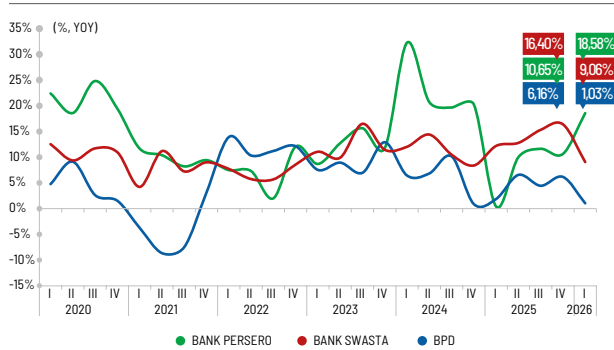
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)				2026 (Rp Triliun)	Pertumbuhan (%, YoY)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026
Total Aset*	100,68	100,45	103,72	105,34	106,38	111,55	117,07	118,94	120,32	11,06%	12,87%	12,92%	13,10%
Total Dana*	82,20	86,84	89,14	91,07	91,15	95,75	101,67	103,11	104,66	10,25%	14,06%	13,22%	14,83%
Total Kredit*	48,61	51,19	51,96	53,11	55,38	57,30	59,82	61,32	63,57	11,95%	15,12%	15,46%	14,79%
Total Kredit**	71,72	73,69	74,34	79,32	84,56	85,91	89,65	99,89	103,77	16,59%	20,61%	25,92%	22,72%
NPL*	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	2,39%	2,28%	-	-	-	-
LDR*	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%	96,87%	99,15%	-	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia
*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

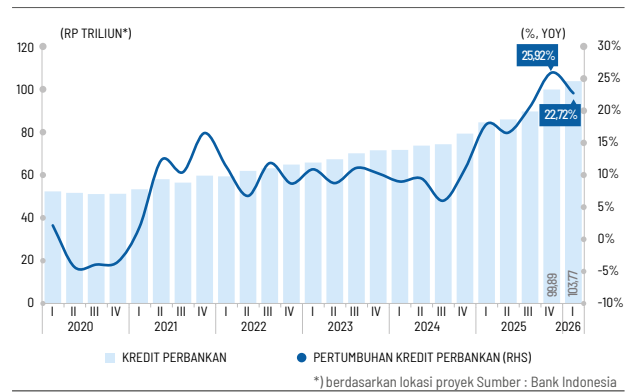
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan I 2026, total DPK di Kepri tercatat sebesar Rp104,66 triliun atau tumbuh 14,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,22% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari giro yang tumbuh sebesar 30,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 17,98% (yoy). Di sisi lain, tabungan dan deposito terdeselerasi dengan masing-masing tumbuh sebesar 8,95% (yoy) dan 0,10% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,43% (yoy) dan 5,87% (yoy). Secara keseluruhan, struktur DPK pada triwulan I 2026 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,40%, diikuti giro 40,02% dan deposito 17,57%. Pangsa instrumen giro yang relatif tinggi mengindikasikan preferensi masyarakat atau pelaku usaha untuk menjaga likuiditas yang optimal guna mendukung kelancaran transaksi operasional harian.

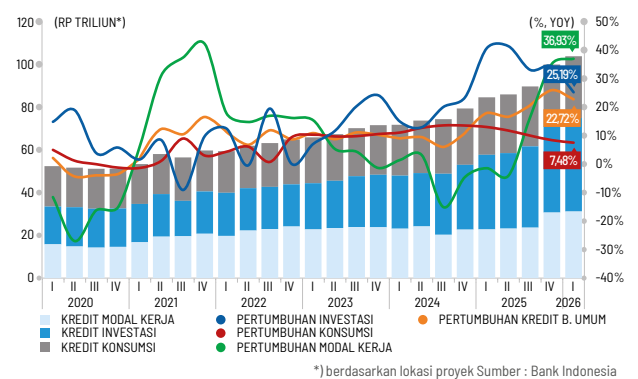
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di wilayah Kepri pada triwulan I 2026 sebesar Rp103,77 triliun atau tumbuh 22,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 25,92% (yoy). Deselerasi terutama didorong oleh perlambatan kredit konsumsi dan kredit investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 7,48% (yoy) dan 25,19% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,37% (yoy) dan 34,26% (yoy). Di sisi lain, kredit modal kerja mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 36,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,16% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan I 2026 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 42,13%, diikuti oleh kredit modal kerja 30,02% dan kredit konsumsi sebesar 27,86%.

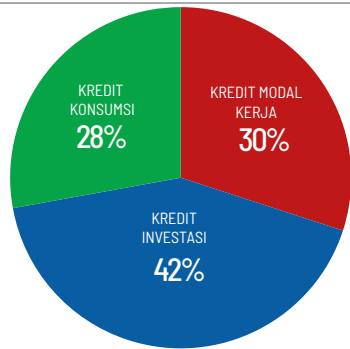


Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan



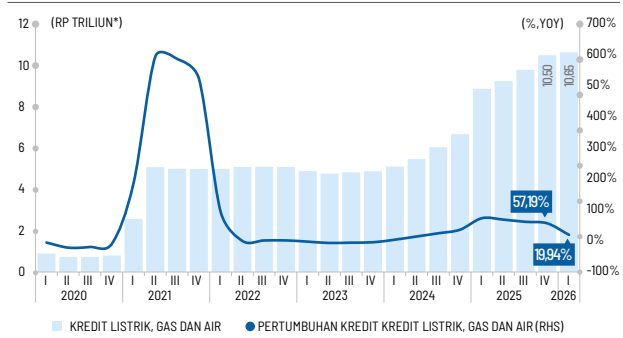
Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada triwulan I 2026, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,25%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,34%. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tercatat sebesar 7,71% dan 7,53%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,03% dan 7,59%. Di sisi lain, suku bunga kredit konsumsi mengalami peningkatan menjadi 9,93%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 9,75% pada triwulan IV 2025. Di samping itu, suku bunga simpanan (DPK) juga cenderung menurun. Suku bunga giro pada triwulan laporan sebesar 1,75%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,87%, sejalan dengan suku bunga deposito yang turun menjadi 3,34% dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,90%. Adapun suku bunga tabungan turut mengalami penurunan menjadi 0,59%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,60% pada triwulan IV 2025.



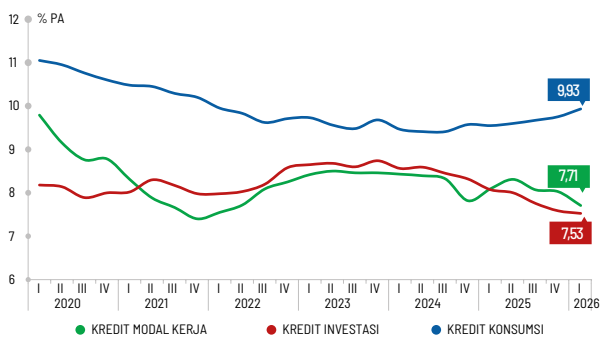
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



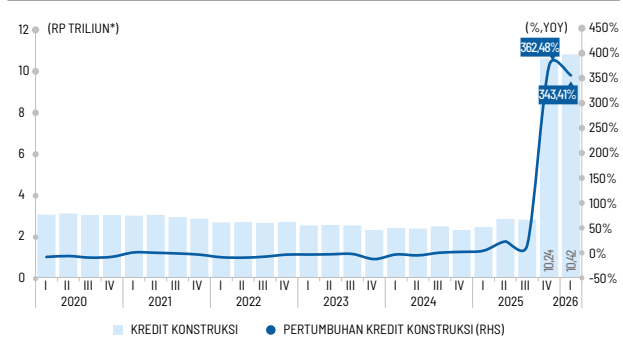
*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Listrik, Gas, dan Air



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Konstruksi

Secara sektoral, deselerasi pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama didorong oleh kredit LU Listrik, Gas, dan Air yang tumbuh 19,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 57,19% (yoy). LU Konstruksi juga mengalami deselerasi dari tumbuh 362,48% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 343,41% (yoy) pada triwulan I 2026. LU Real Estate, Sewa dan Jasa PT juga menunjukkan perlambatan dengan tumbuh 46,11% (yoy), lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 58,77% (yoy).

Perlambatan yang lebih dalam pada triwulan I 2026 tertahan oleh peningkatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 85,67% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,42% (yoy). Selain itu, LU Adm Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 1394,98% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,05% (yoy).

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan I 2026 sebesar Rp81,21 triliun atau setara dengan pangsa 78,25% dari total kredit di Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa lebih dari 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 7,69% dari total kredit atau sebesar Rp7,98 triliun, diikuti Kabupaten Bintan dengan pangsa 6,73% dari total kredit atau sebesar Rp6,98 triliun dan Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,62% dari total kredit atau sebesar Rp4,79 triliun.

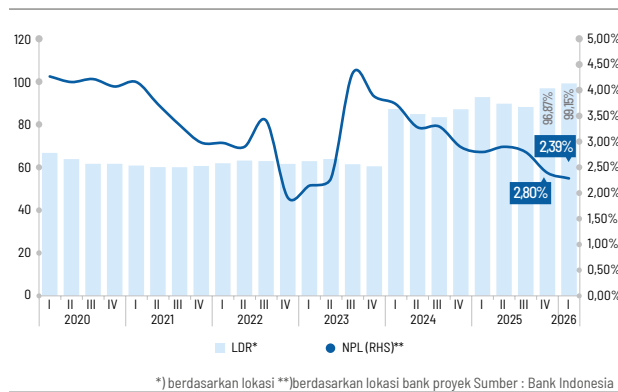
Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan I 2026	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Kota Batam	81,21	78,25%
Kota Tanjungpinang	7,98	7,69%
Kab. Karimun	4,79	4,62%
Kab. Lingga	0,93	0,90%
Kab. Natuna	1,47	1,42%
Kab. Bintan	6,98	6,73%
Kab. Kep. Anambas	0,41	0,40%
Total	103,77	100,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan menjadi 99,15%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 96,87%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas kredit atau NPL menjadi 2,28%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,39%. Dengan perkembangan tersebut, risiko kredit perbankan di Kepri tetap terjaga dan masih berada di bawah ambang batas (*threshold*) 5%.



Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

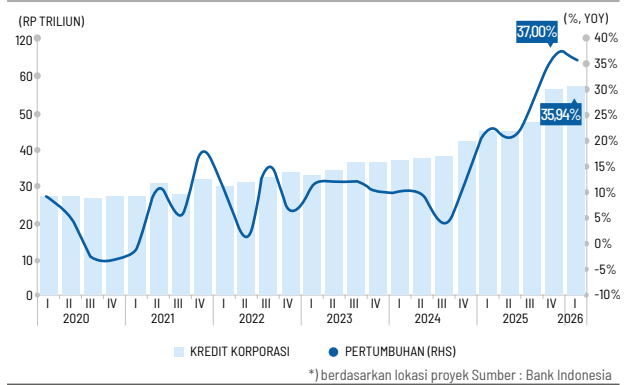
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi, rumah tangga, dan UMKM mengalami deselerasi pada triwulan I 2026. Perkembangan ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan meskipun tumbuh terbatas pada triwulan laporan.

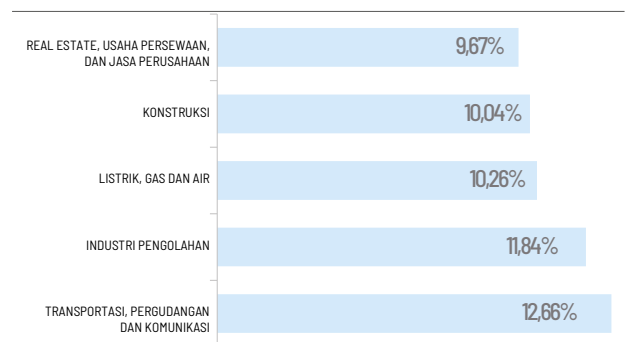
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami deselerasi pada triwulan I 2026. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp60,58 triliun atau tumbuh 35,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 37,00% (yoy). Di tengah pertumbuhan kredit yang tetap positif, risiko kredit korporasi juga mengalami perbaikan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang menurun menjadi 3,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,70%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan pangsa sebesar 12,66% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Industri Pengolahan (11,84%), LU Listrik, Gas, dan Air (10,26%), LU Konstruksi (10,04%), serta LU Perdagangan Besar dan Eceran (9,67%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan I 2026 masih di bawah 10%.



Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



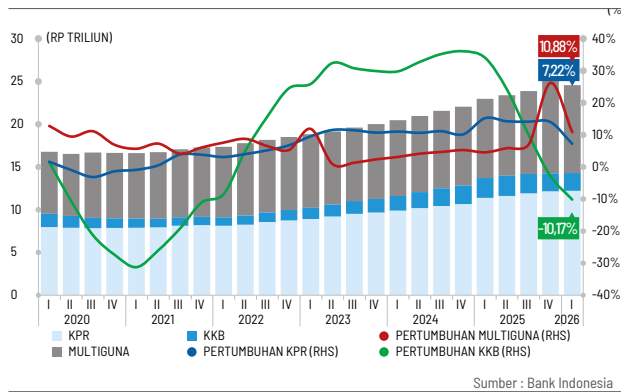
Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

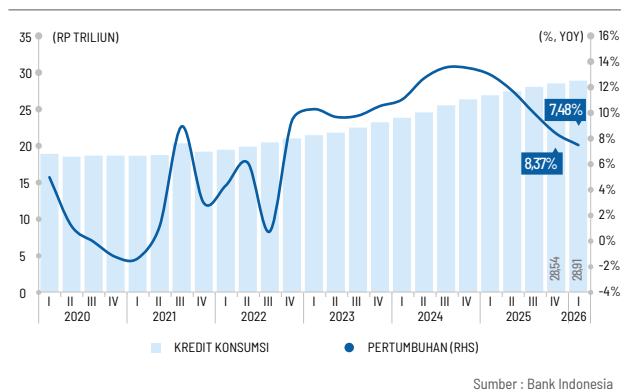
Ketahanan sektor rumah tangga mengalami perlambatan sejalan dengan terdeselerasinya penyaluran kredit rumah tangga. Meskipun demikian, hasil survei triwulanan menunjukkan peningkatan pada rata-rata indeks triwulan I 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 130,75 dan 119,83 pada triwulan IV 2025 menjadi 132,22 dan 123,39 pada triwulan I 2026. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mengalami sedikit penurunan dari yang semula tercatat 141,67 menjadi 141,06 pada triwulan I 2026.

Lebih lanjut, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan I 2026 menjadi sebesar 138,17 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,83. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen terjaga pada level optimis (>100), yang mencerminkan persepsi kondisi ekonomi yang membaik sekaligus ekspektasi konsumen tetap berada pada level optimis.

Di tengah penguatan keyakinan konsumen, penyaluran kredit rumah tangga mengalami perlambatan. Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 7,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,82% (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 7,22% (yoy), -10,17% (yoy), dan 10,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,00% (yoy), -2,85% (yoy), dan 26,23% (yoy).



Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga

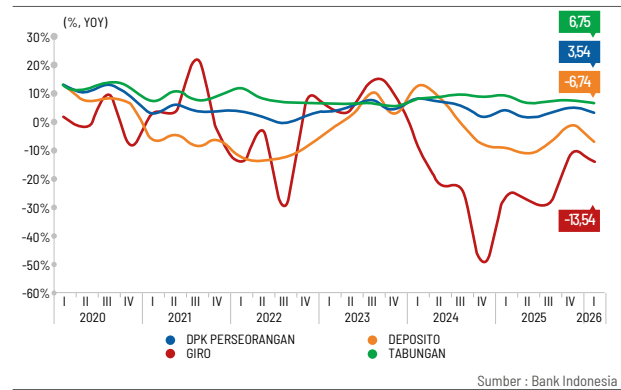


Grafik 4.17 Kredit Konsumsi

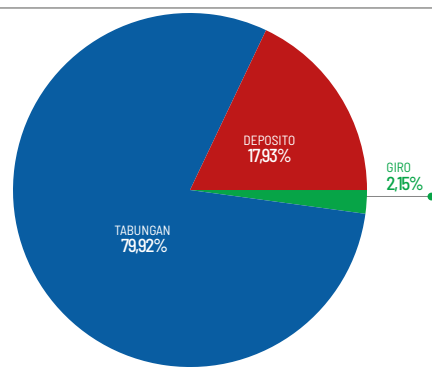
Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 3,54% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,35% (yoy). Deselerasi tersebut didorong oleh turunnya kinerja giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar -13,54% (yoy), 6,75% (yoy), dan -6,74% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -10,90% (yoy),

7,47% (yoy), dan -0,97% (yoy). Struktur tabungan masih mendominasi pangsa DPK perseorangan dengan pangsa 79,92%, diikuti deposito 17,93% dan giro 2,15%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, rasio NPL kredit rumah tangga pada triwulan I 2026 relatif terjaga, meskipun rasio NPL mengalami sedikit peningkatan namun masih berada di bawah threshold 5%. Rasio NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 1,83% dari sebelumnya sebesar 1,80% pada triwulan IV 2025. Peningkatan NPL terjadi pada kategori Kredit Kendaraan Bermotor dari 1,14% menjadi 1,17%, dan Kredit Multiguna dari 1,38% menjadi 1,51%. Sementara NPL kredit peralatan rumah tangga tercatat mengalami perbaikan dengan nilai 2,92%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 3,43%.



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%	1,84%	1,97%	2,00%	1,80%	1,83%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%	2,38%	2,41%	2,32%	2,03%	2,03%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%	0,90%	1,14%	1,10%	1,14%	1,17%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%	2,20%	2,83%	3,35%	3,43%	2,92%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%	1,46%	1,56%	1,63%	1,38%	1,51%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%	1,20%	1,37%	1,55%	1,53%	1,50%

Sumber: Bank Indonesia
(*) berdasarkan lokasi proyek

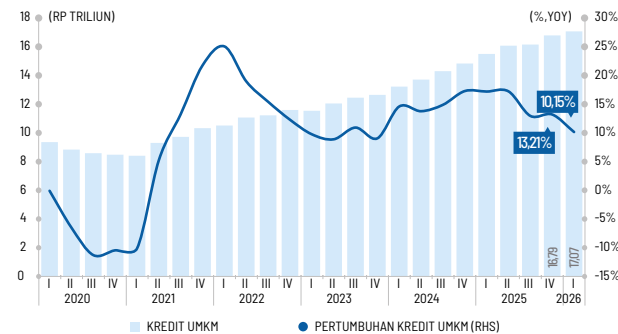
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan I 2026 terdeselerasi, namun terjadi penurunan risiko kredit. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 10,15% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,21% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tercermin dari rasio NPL kredit UMKM yang pada triwulan sebelumnya tercatat menurun dari 3,04% menjadi 2,73%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 16,45%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 16,81%. Dengan perkembangan tersebut, penyaluran kredit UMKM masih perlu terus didorong untuk mendukung pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM masih ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta LU Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 34,46%, 20,24%, dan 7,83%.

Penyaluran kredit UMKM yang terdeselerasi didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, yang pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 48,72% (yoy), melambat menjadi 27,68% (yoy) pada triwulan I 2026. Selain itu, perlambatan juga didorong oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tercatat tumbuh sebesar 0,33% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,91% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM



BOKS 3

Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026:

Sinergi Memperkuat Ekosistem Halal dan Ekonomi Syariah Kepri

Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) merupakan National Halal Fair (NHF) Kepulauan Riau (Kepri) yang diinisiasi oleh KPwBI Provinsi Kepri, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem halal dan ekonomi syariah di wilayah Kepri, sekaligus mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan. Rangkaian kegiatan KURMA 2026 berlangsung pada tanggal 2 s.d. 8 Maret 2026 di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

KURMA 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan KURMA merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, memperkuat peran UMKM, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata halal dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai bagian dari NHF, KURMA 2026 tidak hanya fokus pada penguatan literasi ekonomi syariah masyarakat, tetapi juga mendorong perluasan ekosistem halal dan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan syariah di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu inisiatif unggulan dalam rangkaian kegiatan ini adalah peluncuran program QRIS ZISWAF dan Program PASTI (Pasar Tradisional Siap Transaksi Digital QRIS), yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan inklusivitas transaksi digital masyarakat, termasuk pada aktivitas sosial keagamaan dan perdagangan di pasar tradisional. Selain itu, momentum KURMA 2026 juga dilengkapi dengan layanan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar menjelang Hari Raya Idulfitri.

Rangkaian kegiatan KURMA 2026 meliputi Bazar UMKM yang menampilkan produk-produk unggulan lokal berbasis halal, berbagai perlombaan seperti lomba nasyid, dakwah syariah, cerdas cermat

eksyar dan konten eksyar, Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bedah Buku Islami, *Business Matching* Pembiayaan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah, serta Pojok Layanan Halal, Perbankan, dan ZISWAF yang menyediakan berbagai layanan konsultasi, sertifikasi halal, serta edukasi produk keuangan syariah.

KURMA 2026 ditutup secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 8 Maret 2026 di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan KURMA 2026 yang dinilai mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan menegaskan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor UMKM, promosi produk halal, serta pengembangan ekonomi syariah.

Dari sisi *output*, KURMA 2026 berhasil mencatat capaian dengan nilai transaksi penjualan Rp2,54 miliar serta hasil *business matching* pembiayaan sebesar Rp2,265 miliar.

Dengan dukungan penuh dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kepri dan para mitra strategis lainnya, KURMA 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Provinsi Kepri menuju terwujudnya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar *event* tahunan, KURMA telah berkembang menjadi elemen kunci dalam *roadmap* pengembangan ekonomi syariah nasional. Sebagai bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatra pada Juni 2026 serta Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang akan digelar pada Oktober 2026.



Gambar B3.1 Pembukaan KURMA 2026 oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau



Gambar B3.2 Fashion Show dalam rangkaian KURMA 2026



Gambar B3.3 Perlombaan dalam KURMA 2026



Gambar B3.4 Seminar Ekonomi Keuangan Syariah



Gambar B3.5 Bazaar Produk Unggulan UMKM Kepulauan Riau



Gambar B3.6 Penutupan KURMA 2026 oleh Menteri Dalam Negeri RI

BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw I
2026

Rp 1,55 T



Tw IV
2025

Rp 507 M

Outflow Uang Kartal



Tw I
2026

Rp 2,54 T



Tw IV
2025

Rp 3,54 T

Net Flow Uang Kartal



Tw I
2026

Rp 989 M
Net Outflow



Tw IV
2025

Rp 3,03 T
Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw I
2026

Rp 56,17 T
24,24% (yoy)



Tw IV
2025

Rp 64,17 T
24,92% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw I
2026

Rp 5,62 T
-4,21% (yoy)



Tw IV
2025

Rp 6,67 T
-2,67% (yoy)

Sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif pada triwulan I 2026. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan I 2026 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp989 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar Rp3,03 Triliun. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) tetap kuat. Kondisi ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang tetap terjaga, didukung kemudahan akses layanan pembayaran nontunai. Peningkatan aktivitas sistem pembayaran tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,04% (yoy) pada triwulan I 2026.

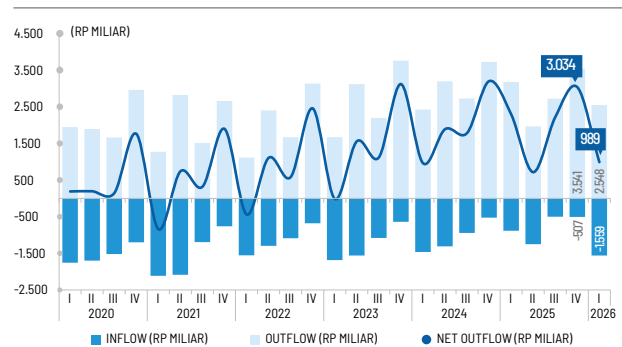
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*¹⁾/*Outflow*²⁾)

Pada triwulan I 2026, pergerakan aliran uang kartal di Kepri tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp989 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp3,03 triliun. Secara rinci, jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan I 2026 mencapai Rp2,54 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar Rp3,54 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,55 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp507 miliar. *Net outflow* tersebut mengindikasikan kebutuhan uang tunai masyarakat yang tetap terjaga sejalan dengan momen HBKN Ramadhan dan Idulfitri serta kinerja perekonomian Kepri yang tetap tumbuh positif dan mendukung perputaran aktivitas ekonomi. Adapun kondisi tersebut turut mencerminkan perekonomian daerah yang masih kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain kinerja lapangan usaha utama di Kepri yaitu industri pengolahan yang tumbuh 5,79% (yoy), pertambangan dan penggalian yang tumbuh 23,19% (yoy), konstruksi yang tumbuh 3,06% (yoy), serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 9,03% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan juga didukung oleh Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga yang tetap terjaga.

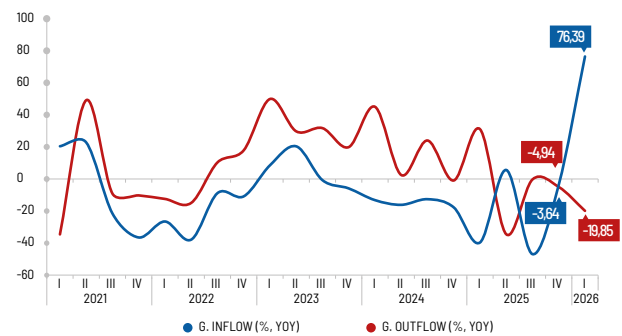
Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, layanan kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) guna menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada triwulan I 2026, Bank Indonesia juga menyelenggarakan layanan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) guna memenuhi kebutuhan uang Rupiah pada periode HBKN Idulfitri.

1) *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2) *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



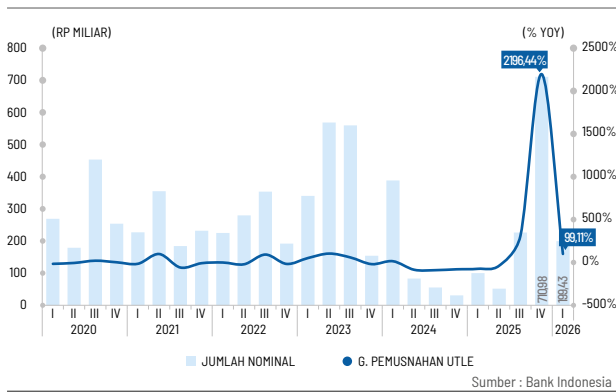
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang dalam peredaran. Proses penyediaannya mencakup penerbitan uang yang berkualitas, pengelolaan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, layanan kas keliling, serta pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak Rp199 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp710 miliar. Pemusnahan mencakup uang yang rusak atau tidak memenuhi standar kelayakan edar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE terutama didorong oleh berkurangnya *outflow* atau kebutuhan uang tunai pada periode triwulan I 2026 dibandingkan periode HBKN Nataru pada triwulan IV 2025. Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.



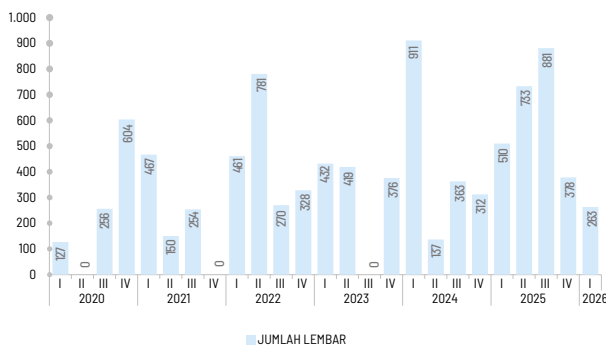
Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, berbagai kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi di beragam kanal. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah, pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah diharapkan semakin meningkat sehingga dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan I 2026 terdapat 263 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 378 lembar. Bank Indonesia secara konsisten mendorong edukasi CBP Rupiah termasuk diseminasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran uang palsu.

Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi ke kantor Bank Indonesia terdekat dan dihimbau untuk melaporkan temuan tersebut dengan menyertakan fisik uang melalui bank atau kepada kepolisian. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, baik secara langsung atau melalui perbankan, akan diteliti lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia uang tersebut dinyatakan tidak asli, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

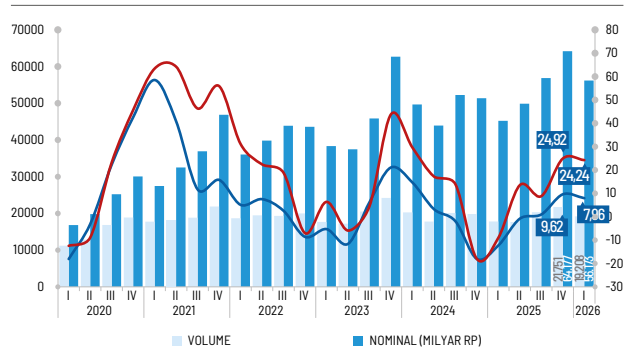


Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

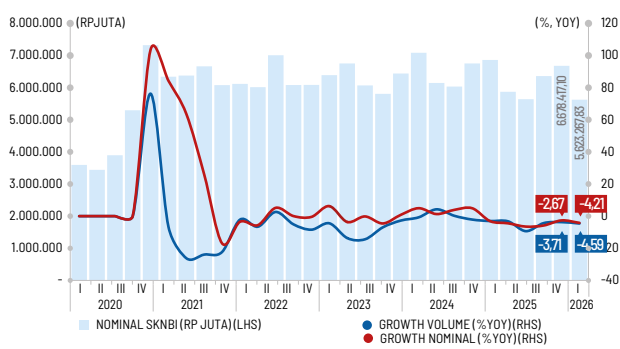
Nominal transaksi sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh melambat pada triwulan I 2026. Nominal transaksi BI-RTGS di Kepri pada triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp56,17 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp64,17 triliun. Secara tahunan, nominal transaksi RTGS pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 24,24% (yoy), sedikit mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,92% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,62% (yoy). Meski mengalami deselerasi, pertumbuhan positif transaksi RTGS mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi bernilai besar di Kepri tetap terjaga pada triwulan laporan.



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp5,62 triliun, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp6,67 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI pada triwulan I 2026 masih terkontraksi sebesar 4,21% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi 2,67% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 4,59% (yoy) pada triwulan I 2026, juga lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar 3,71% (yoy). Kontraksi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat terhadap layanan SKNBI cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, tersedia BI-FAST yang menyediakan layanan transfer secara real-time dan 24/7, serta QRIS yang memberikan kemudahan akses pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan transaksi masyarakat.



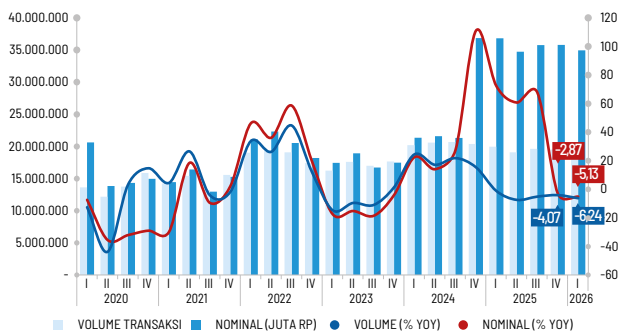
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

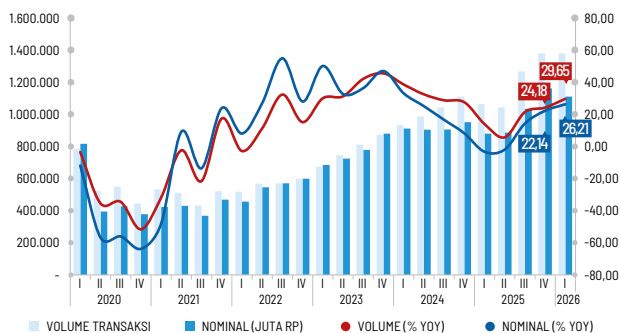
Volume transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan I 2026 terkontraksi sebesar 6,24% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,07% (yoy). Nominal transaksi kartu debit juga terkontraksi lebih dalam sebesar 5,13% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,87% (yoy).

Di sisi lain, transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan I 2026 mengalami akselerasi. Volume transaksi tumbuh 29,65% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 24,18% (yoy). Nominal transaksi juga menguat dari 22,14% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 26,21% (yoy) pada triwulan I 2026. Pertumbuhan volume dan nominal kartu kredit yang tinggi masih mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat masih terjaga didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.



Sumber : Bank Indonesia

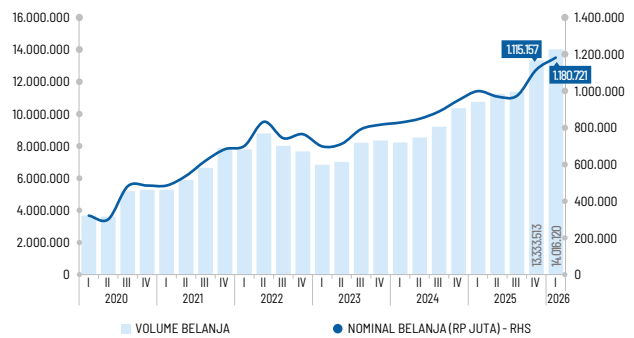
Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

Selanjutnya, Nilai transaksi UE di Kepri pada triwulan I 2026 tercatat Rp1,18 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar Rp1,11 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 13,33 juta transaksi pada triwulan sebelumnya menjadi 14,01 juta transaksi pada triwulan I 2026. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembayaran digital seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tetap kuat. Untuk terus mendorong transaksi nontunai, Bank Indonesia memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital, khususnya melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).



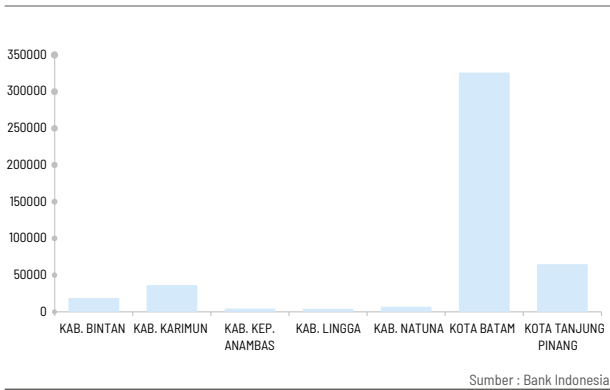
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

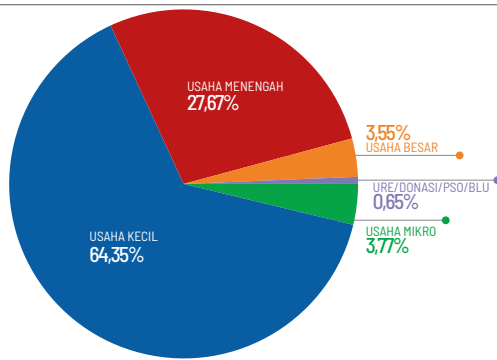
5.2.4 Perkembangan QRIS

Implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan I 2026 tercatat penambahan sebanyak 21.309 pengguna baru atau tumbuh sebesar 3,78% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tumbuh 2,05% (qtq). Dengan demikian, total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan I 2026 telah mencapai 585.379 pengguna. Dari sisi transaksi, pada triwulan I 2026 tercatat 31.769.243 transaksi atau terkontraksi sebesar 7,93% (qtq), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,20% (qtq). Meski demikian, nominal transaksi QRIS di Kepri pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp3,88 triliun atau tetap tumbuh sebesar 1,20% (qtq). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun frekuensi transaksi mengalami penurunan, nilai transaksi secara keseluruhan tetap meningkat, yang mencerminkan penggunaan QRIS untuk transaksi dengan nilai rata-rata yang lebih besar.

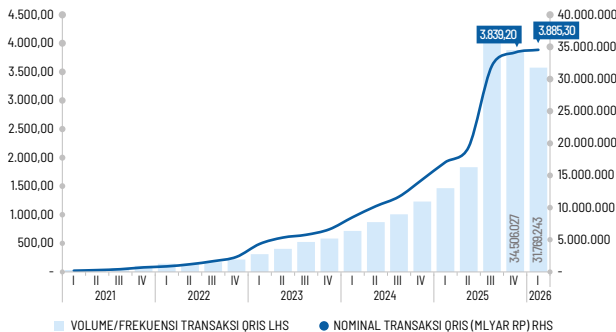
Hingga triwulan I 2026, jumlah *merchant* QRIS tercatat sebesar 461.305 *merchant*, atau terkontraksi sebesar 23,89% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,53% (yoy). Mayoritas *merchant* berlokasi di Kota Batam (70,68%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (14,07%) dan Kab. Karimun (7,88%). *Merchant* QRIS di Kepri didominasi oleh kategori Usaha Kecil dengan pangsa sebesar 64,35%, kategori Usaha Menengah dengan pangsa sebesar 27,67%, dan Usaha Mikro sebesar 3,77%. Dengan demikian, sebanyak 95,79% *merchant* QRIS di Kepri termasuk dalam kategori UMKM, sehingga perluasan akseptasi QRIS tetap strategis dalam mendukung digitalisasi pembayaran dan penguatan inklusi keuangan daerah.



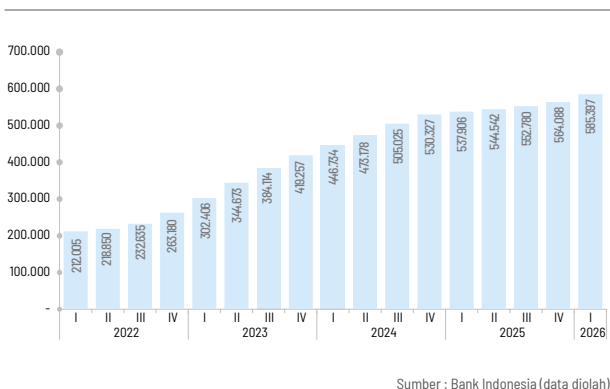
Sumber : Bank Indonesia
Grafik 5.10 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri Triwulan I 2026



Sumber : Bank Indonesia
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha Triwulan I 2026



Sumber : Bank Indonesia
Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)
Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Mempertimbangkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, Bank Indonesia Kepri memperkuat strategi dalam peningkatan pengguna QRIS melalui sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding QRIS*. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan I 2026 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi QRIS Cross-Border khususnya pada kawasan wisata dan transportasi internasional seperti Kapal Ferry.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. Apresiasi merchant dan user bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ *onboarding*/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
 - a. QRIS Goes to School/Campus;
 - b. Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
 - c. Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Sinergi QRIS dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. *On boarding* sektor pariwisata seperti hotel, *travel agent*, dan objek wisata.
8. *Showcase* dan QRIS Experience pada event strategis untuk memperluas transaksi QRIS.

Bank Indonesia Kepri konsisten mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk mengimplementasikan QRIS sekaligus mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi. Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para stakeholders terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan memperkuat perluasan QRIS, khususnya QRIS Cross-Border sejalan dengan letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Selain itu, Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan pintu keluar masuk turis mancanegara.

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

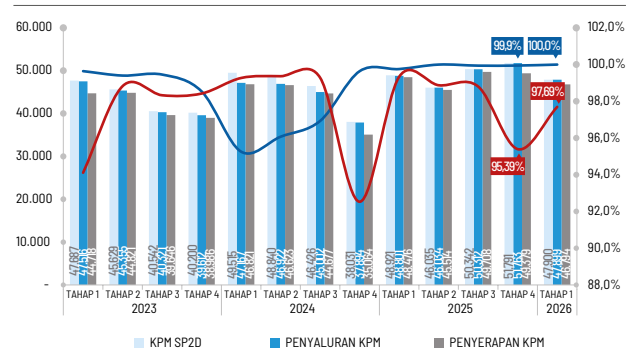
Pengembangan ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan kanal pembayaran nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri mendorong dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain melalui perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan hingga triwulan I 2026 antara lain:

- Rapat koordinasi dan *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- Fasilitasi koordinasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu dan strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk eskalasi isu strategis perluasan digitalisasi daerah.
- Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

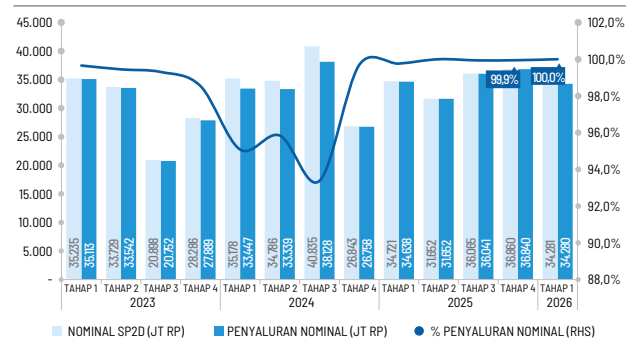
5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Prakerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

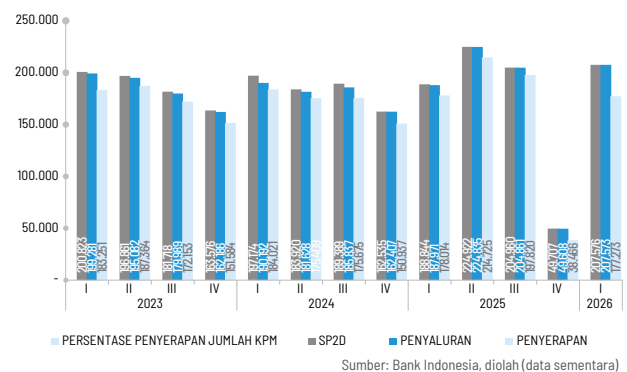
Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 1 yang mencakup periode bulan Januari sampai dengan Maret 2026 secara nominal mencapai Rp34,28miliar, atau 100% dari pagu sebesar Rp34,28 miliar dengan target penyaluran sebanyak 47.900 KPM. Bantuan PKH telah disalurkan kepada 46.794 KPM atau sebesar 97,69% dari target. Sementara itu, penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan I 2026 adalah sebesar 207.576 penerima dengan tingkat penyerapan 85,40% dari target penyaluran.



Grafik 5.14 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 5.15 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 5.16 Penyaluran Program Sembako Triwulan I 2026 di Wilayah Provinsi Kepri

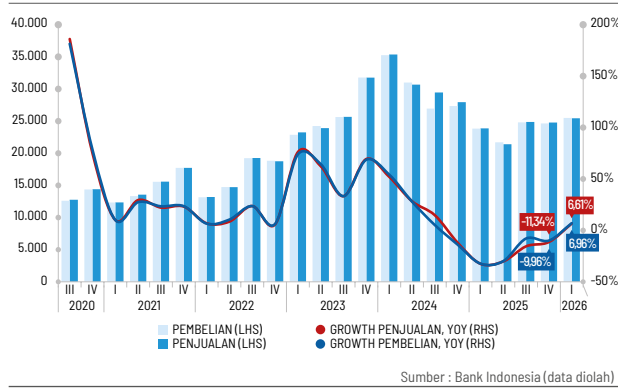
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 121 KUPVA BB dan 70 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan I 2026.

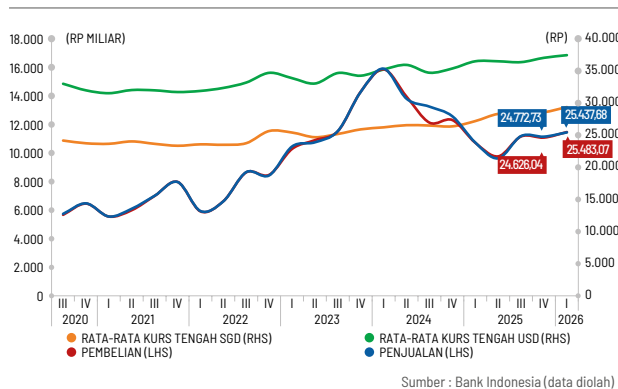
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Perkembangan KUPVA BB di Kepri pada Triwulan I 2026 menunjukkan perubahan jumlah jaringan kantor jika dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Jumlah Kantor Pusat (KP) KUPVA BB meningkat dari 120 menjadi 121 kantor di triwulan I 2026. Sementara itu, jumlah Kantor Cabang (KC) mengalami pengurangan dari 72 kantor pada triwulan sebelumnya menjadi 70 kantor pada triwulan I 2026.

Pada triwulan I 2026, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)
Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi KUPVA



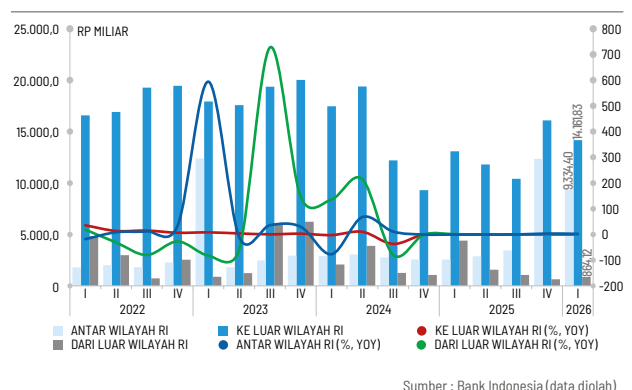
Sumber : Bank Indonesia (data diolah)
Grafik 5.18 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 76,12% atau sejumlah Rp38,75 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 14,40% atau sejumlah Rp7,33 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,76% atau sejumlah Rp2,42 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 1,91% atau sejumlah Rp974,86 miliar, dan mata uang lainnya sebesar 1,44% atau sejumlah Rp733,15 miliar. Secara keseluruhan, total transaksi UKA pada Triwulan I 2026 setara dengan Rp50,92 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,08% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2025.

5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi *outgoing* sebesar 58,13%, diikuti transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik dengan pangsa sebesar 38,32% dan transaksi dari luar wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 3,55%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan I 2026, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari wilayah Indonesia ke luar negeri antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan I 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebanyak 70 PJP LR. Dari nominal transaksi, transaksi domestik dan *outgoing* mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi domestik tumbuh 264,87% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 380,17% (yoy). Transaksi *outgoing* juga tumbuh pada triwulan I 2026 sebesar 8,15% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 72,94% (yoy). Adapun transaksi *incoming* mengalami kontraksi sebesar 80,34% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 39,07% (yoy). Secara umum, pada triwulan I 2026 pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan sebesar 21,51% (yoy) atau menjadi sebesar Rp24,36 triliun pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas layanan remitansi di Kepri masih terjaga, terutama ditopang oleh transaksi domestik dan *outgoing*.



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)
Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

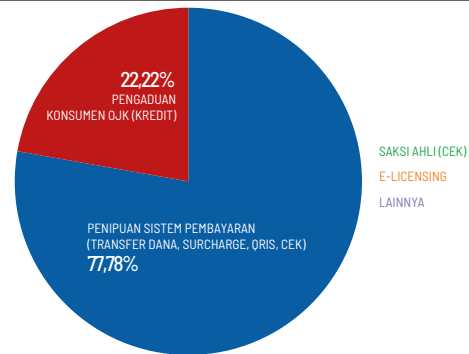
5.3.3 Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi perlindungan konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta konten di media sosial. Hingga triwulan I 2026 telah dilaksanakan berbagai edukasi yang bertujuan

meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Kegiatan ini meliputi seminar dan sosialisasi yang berfokus pada edukasi hak dan kewajiban konsumen antara lain perlindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai modus penipuan digital. Pemanfaatan media sosial juga dioptimalkan untuk mensosialisasikan informasi penting terkait perlindungan konsumen.

Selain itu, edukasi perlindungan konsumen turut dilakukan melalui kunjungan sekolah serta sosialisasi pada *event* Bank Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi luring serta diperkuat melalui edukasi di stasiun radio berupa siaran langsung dan himbuan kepada masyarakat di Kota Batam.

Sepanjang triwulan I 2026, KPwBI Kepri telah menerima 9 (sembilan) pengaduan konsumen dan seluruhnya telah diselesaikan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen Sepanjang Tahun 2025



BAB 6

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Februari
2026

1.109.140
Orang

Februari
2025

1.091.750
Orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Februari
2026

66,77%

Februari
2025

66,84%

Tingkat Pengangguran Terbuka



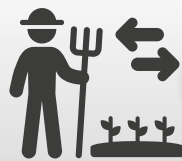
Februari
2026

6,87%

Februari
2025

6,89%

Nilai Tukar Petani



Tw I
2026

106,38

Tw IV
2025

105,61

Tingkat Kemiskinan



September
2025

4,26%

September
2024

4,78%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun
2025

80,53

Tahun
2024

79,89

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode							Perubahan Ags - Nov2025	
	Feb'23	Ags'23	Feb'24	Ags'24	Feb'25	Ags'25	Nov'25	Orang	% Perubahan*
Angkatan Kerja (orang)	1.129.501	1.153.878	1.057.918	1.107.353	1.078.170	1.091.750	1.109.140	13.580	1,26%
Bekerja	1.062.004	1.037.133	973.125	1.023.125	1.003.390	1.016.540	1.032.990	13.150	1,31%
Pengangguran	67.497	116.745	84.793	84.228	74.780	75.210	76.160	430	0,58%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,98%	10,12%	8,02%	7,61%	6,94%	6,89%	6,87%		-0,72%
- Perdesaan	2,33%	3,78%	5,69%	4,71%	5,73%	5,89%	3,80%		2,79%
- Perkotaan	6,30%	10,64%	8,25%	7,90%	7,06%	6,99%	7,12%		-0,99%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,23%	66,39%	66,48%	67,29%	67,14%	66,84%	66,77%		

Sumber: BPS (data diolah)

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan¹

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri yang tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)² relatif stabil dengan kecenderungan membaik secara tahunan. TPT pada Februari 2026 berada pada level 6,87%, lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 6,89%. Secara spasial, perubahan TPT tersebut terjadi karena perbedaan kondisi antar wilayah. TPT perdesaan mengalami perbaikan dari 5,89% menjadi 3,80%, sementara TPT perkotaan meningkat dari 6,99% pada Februari 2025 menjadi 7,12% pada Februari 2026.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan menurun pada kelompok pendidikan SMP ke bawah dari sebesar 5,76% pada Februari 2025 menjadi 3,82% pada Februari 2026. Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan serapan tenaga kerja pada kedua kelompok pendidikan tersebut. Sementara itu, pada

kelompok SMA/SMK TPT dan perguruan tinggi meningkat dari rata-rata sebesar 7,85% dan 6,33% pada Februari 2025 menjadi 8,67% dan 7,93% pada Februari 2026.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 21,89% dari jumlah tenaga kerja pada Februari 2026, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,81%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (14,36%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (15,30%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,92%), dan LU Pertanian, Kehutanan, dan perikanan (8,95%).

Secara tahunan, pangsa kelompok berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas mengalami penurunan masing-masing 0,26 persen poin, 1,93 persen poin, dan 0,24 persen poin pada bulan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, dan pekerja keluarga yang masing-masing meningkat sebesar 1,28 persen poin, 0,75 persen poin dan 0,39 persen poin pada bulan Februari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran								
		Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Feb'24	Feb'25**	Feb'26
1	≤SD	3,83%	6,06%	3,47%	5,37%	4,05%	4,78%	3,97%		
2	SMP	6,52%	3,30%	4,59%	8,61%	8,69%	6,45%	10,47%	5,76%	3,82%
3	SMA	11,98%	6,87%	6,38%	11,18%	10,83%	10,33%	6,14%		
4	SMK	5,21%	11,20%	10,37%	13,39%	8,24%	9,41%	10,17%	7,85%	8,67%
5	Diploma I/II/III	3,15%	4,30%	9,29%	15,23%	10,00%	8,16%			
6	Universitas	3,60%	4,37%	2,24%	9,59%	5,30%	5,12%	7,86%*	6,33%	7,93%

Sumber: BPS (diolah)

*Terdapat perubahan pola rilis di TPT Diploma dan Universitas. Rilis sebelumnya angkanya dipisah, namun per Feb 24 digabung
**Terdapat perubahan pola rilis berdasarkan pendidikan yang dibagi pada 3 kategori saja yaitu SMP ke Bawah, SMA/SMK, Perguruan Tinggi

- 1 Pada sakernas 2025, indikator ketenagakerjaan dirilis pada periode Februari, Agustus, dan November
- 2 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja



Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Feb '21	Feb '22	Feb '23	Feb '24	Feb '25	Feb '26
1	Industri Pengolahan	26,14%	24,54%	27,42%	21,73%	20,81%	21,89%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	20,16%	20,09%	17,24%	15,94%	14,96%	14,36%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	13,94%	12,95%	13,92%	17,78%	17,17%	15,30%
4	Konstruksi	8,49%	9,46%	8,02%	8,32%	6,85%	8,89%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,98%	7,17%	5,59%	7,77%	8,77%	8,95%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82%	6,16%	9,63%	11,16%	11,58%	12,92%
7	Transportasi dan Pergudangan (pengangkutan)	5,79%	6,15%	5,39%	5,98%	5,96%	5,80%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	4,78%	6,06%	5,87%	4,86%	6,19%	4,91%
9	Jasa Lainnya	4,63%	5,80%	5,62%	4,99%	5,58%	4,60%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	1,27%	1,62%	1,30%	1,46%	2,13%	2,38%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

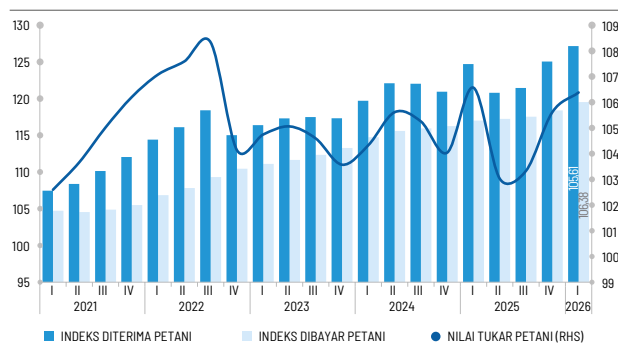
No	Lapangan Pekerjaan Utama	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	
1	Berusaha Sendiri	19,06	15,46	15,75	16,86	16,82	16,56	-0,26
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,34	7,55	6,59	7,05	6,02	7,30	1,28
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,60	3,93	3,86	3,42	3,60	4,35	0,75
4	Buruh/karyawan	61,04	62,57	67,78	63,38	63,94	62,03	-1,91
5	Pekerja Bebas	4,22	3,41	1,06	3,61	4,26	4,02	-0,24
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5,74	7,08	4,96	5,68	5,36	5,75	0,39
TOTAL		100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

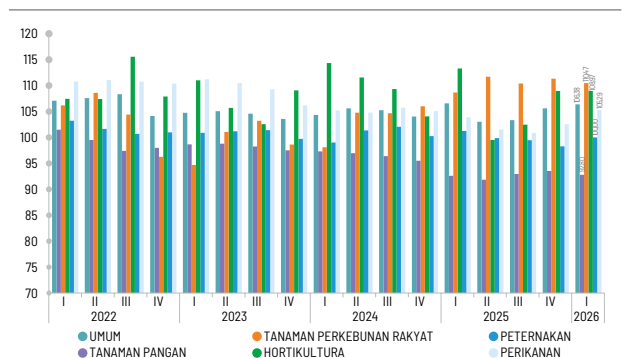
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan I 2026 yang merupakan rata-rata bulan Januari - Maret 2026 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (rata-rata bulan Oktober - Desember 2025). Rata-rata NTP pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 106,38, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,61. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya NTP pada sub-kelompok Holtikultura, Peternakan, dan Perikanan.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 110,47, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Tanaman pangan sebesar 92,80. NTP Sub kelompok tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan mencatatkan penurunan dari triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 111,31 dan 93,53 pada triwulan IV 2025. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada Sub kelompok perikanan dari sebesar 102,55 pada triwulan IV 2025 menjadi 105,29 pada triwulan I 2026 sementara penurunan terdalam terjadi pada sub kelompok tanaman pangan.

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018=100																
	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1. Tanaman Pangan																	
a. Indeks yang Diterima (It)	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18	109,48	108,71	110,36	111,94	112,33
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46	118,21	118,35	118,72	119,69	121,04
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51	92,62	91,86	92,96	93,53	92,80
2. Hortikultura																	
a. Indeks yang Diterima (It)	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16	132,47	116,58	120,35	129,11	130,58
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42	116,94	117,13	117,43	118,44	119,83
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07	113,29	99,53	102,48	108,96	108,97
3. Tanaman Perkebunan Rakyat																	
a. Indeks yang Diterima (It)	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58	128,65	132,43	131,27	133,52	134,11
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53	118,39	118,57	118,90	119,96	121,40
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00	108,66	111,69	110,40	111,31	110,47
4. Peternakan																	
a. Indeks yang Diterima (It)	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56	116,77	115,48	115,38	114,75	117,25
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27	115,34	115,63	116,00	116,76	117,26
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26	101,25	99,87	99,47	98,28	100,00
5. Perikanan																	
a. Indeks yang Diterima (It)	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23	120,67	117,72	117,68	120,24	124,33
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39	116,17	116,46	116,67	117,25	118,09
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06	103,88	101,54	100,86	102,55	105,29
Umum																	
a. Indeks yang Diterima (It)	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94	124,69	120,79	121,45	125,05	127,15
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25	117,01	117,24	117,53	118,39	119,53
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04	106,57	103,03	103,33	105,61	106,38

Sumber: BPS (data diolah)

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebanyak 114.550 orang, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 117.280 orang. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan pada September 2025 meningkat dari Rp832.410/kapita/bulan pada Maret 2025 menjadi Rp870.738/kapita/bulan pada September 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2025 tercatat sebesar 0,601%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2025 yang sebesar 0,688%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan

Kemiskinan pada September 2025 turut mengalami penurunan dari 0,179% pada Maret 2025 menjadi sebesar 0,145% pada September 2025.

6.2.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio³ Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebesar 0,385, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,382. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode Maret – September 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

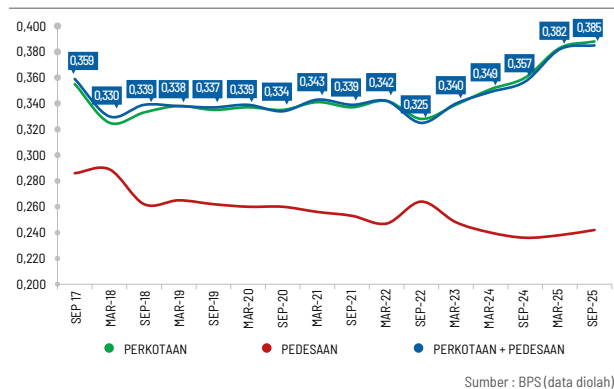
Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2021		2022		2023	2024		2025	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept	Mar	Sept
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960	117.280	114.550
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78	4,44	4,26
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602	832.410	870.738
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635	0,688	0,601
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143	0,179	0,145
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%	-15,20%	-8,33%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%	5,74%	7,82%

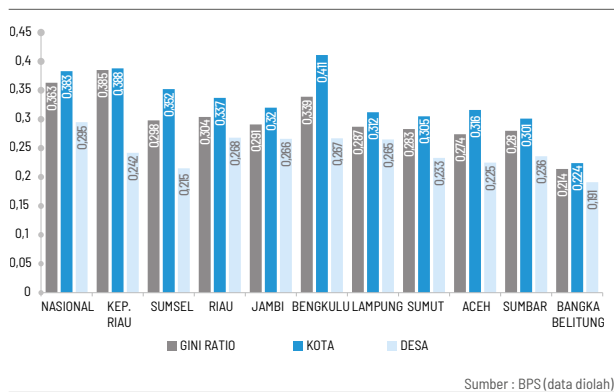
Sumber: BPS (data diolah)

³ Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Gini Ratio perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,388, meningkat dari Maret 2025 sebesar 0,383. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,242, meningkat dari Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,238. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang tertinggi, serta lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 0,363.



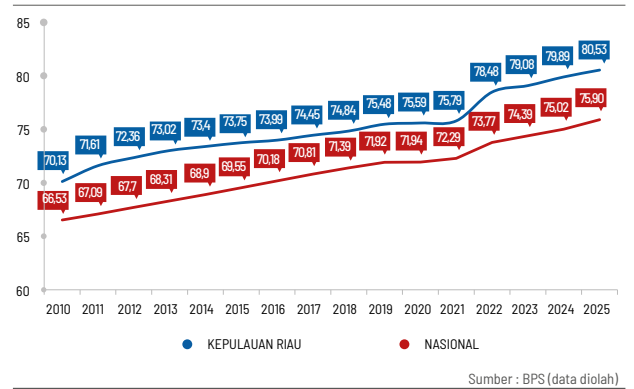
Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,89. Peningkatan IPM Kepri pada 2025 didukung oleh perbaikan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,46, artinya bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2024. Angka UHH ini turut menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,72 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.881.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.573.000,-.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573	15.881
IPM		71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,80 dan 82,02. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49	76,08
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96	78,65
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60	78,94
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05	73,82
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47	74,07
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32	83,80
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58	82,02
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)



BAB 7

Prospek Perekonomian Daerah



Prospek perekonomian global diperkirakan memburuk dengan ketidakpastian gejala global yang tetap tinggi. Kondisi ini diperkirakan didorong oleh dampak perang timur tengah, penutupan selat Hormuz hingga terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara. Sementara momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia perlu dijaga dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh melambat disebabkan faktor *base effect*.

Inflasi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5\pm 1\%$ (yoy). Stabilitas inflasi didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

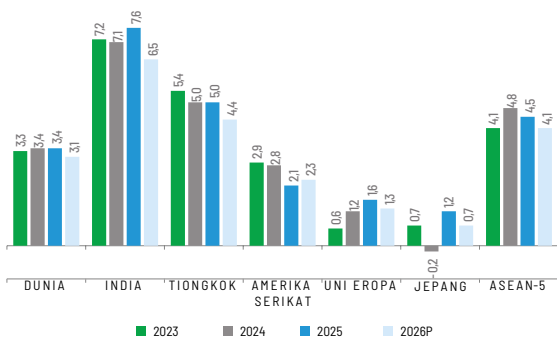


7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian global 2026 diperkirakan melambat dan mengalami revisi ke bawah dibandingkan estimasi sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund (IMF)* pada April 2026, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 3,1% (yoy), atau melambat 0,2 persen poin dibandingkan prakiraan pada Januari 2026. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya fragmentasi geopolitik, ketegangan perdagangan serta penutupan selat hormuz yang berpotensi menahan pertumbuhan secara signifikan dan mengganggu stabilitas pasar keuangan. Adapun pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Jepang melambat menjadi 4,4% (yoy), 6,5% (yoy), 1,3% (yoy), dan 0,7% (yoy) serta pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2026 diproyeksikan turut melambat sebesar 4,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2025 yang juga sebesar 4,2% serta revisi bawah dari proyeksi sebelumnya.

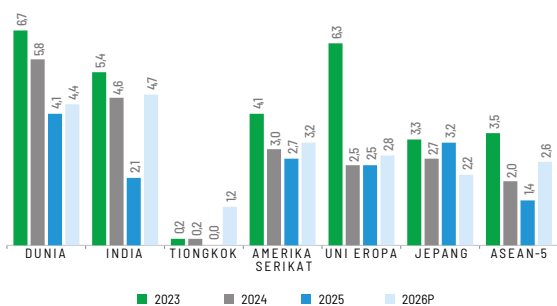
Tekanan inflasi global diproyeksikan berbalik arah dari prakiraan sebelumnya yang cenderung meningkat dari 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 4,4% (yoy) pada tahun 2026. Peningkatan ini terutama didorong oleh serangan terhadap fasilitas energi strategis serta prospek penutupan Selat Hormuz yang lebih lama menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak konflik yang lebih besar dan persisten terhadap perekonomian global.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2025, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan



Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2026

Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

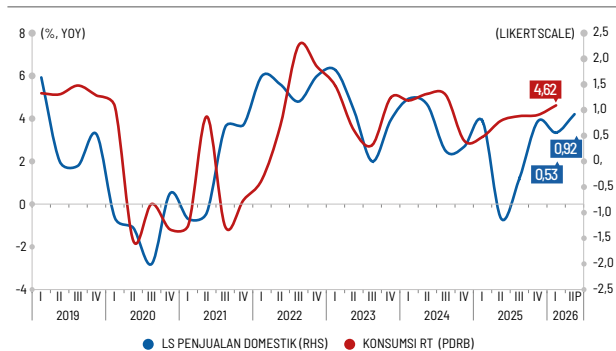


Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2026

Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)

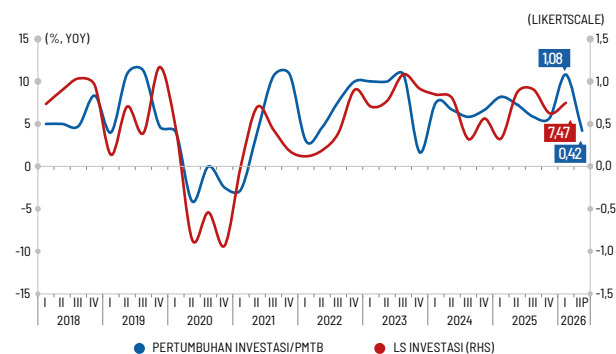
ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9% - 5,7% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik didukung oleh berbagai program stimulus pemerintah serta konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri didukung oleh konsumsi yang terakselerasi dibanding 2025. Hal ini sejalan dengan kenaikan UMR dan *multiplier effect* peningkatan jumlah wisatawan di 2025 yang kembali ke level pra-pandemi dan diperkirakan terus meningkat pada 2026. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau hingga posisi triwulan I 2026 yang menunjukkan *likert scale (LS)* penjualan domestik yang tetap meningkat. Sementara itu, net ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat normalisasi pasca pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2025 serta ketidakstabilan kondisi geopolitik global yang cenderung menahan keputusan investasi. Adapun dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Kepri terutama didukung oleh LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, LU Industri pengolahan juga diperkirakan tumbuh namun mengalami perlambatan dibanding 2025 sejalan dengan disrupsi rantai perdagangan dan tekanan komoditas energi. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2026 tumbuh pada kisaran 6,3% - 7,1% (yoy).**



*) prakiraan Sumber: Bank Indonesia

Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik



*) prakiraan Sumber: Bank Indonesia

Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi



Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2026

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman. Kunjungan wisman mancanegara yang mencapai 2.027.037 kunjungan pada 2025, tumbuh 21,59% dari 2024 dan mencatatkan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan jumlah wisatawan ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.	▲
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Investasi	Investigasi <i>countervailing duty</i> (CVD) oleh AS untuk produk solar panel Indonesia dan <i>refocusing</i> anggaran subsidi <i>green energy</i> oleh AS sebagai importir utama solar panel di Kepri serta ketidakpastian geopolitik mendorong investor cenderung <i>wait and see</i>	▼
Pertambangan	<i>Natural declining</i> sumur tua di Kepri, kesepakatan OPEC+ menghentikan sementara kenaikan produksi minyak untuk kuartal pertama tahun 2026 sehingga dapat menahan kinerja ekspor migas Kepri dan potensi dampak tidak langsung pembatasan impor BBM.	▼
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama <i>Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ)</i> dan <i>Eastern Economic Corridor (EEC)</i> Thailand yang meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	▼
Risiko Geopolitik	Ketidakpastian global meningkat sejalan dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan banyak negara besar dalam dinamika perdagangan internasional seperti AS, China, Rusia, Iran, Ukraina.	▼

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2026

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	<ul style="list-style-type: none"> Potensi kenaikan beberapa bahan pangan, komoditas energi, serta dampak rambatannya seiring ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim Kenaikan UMR yang berpotensi mendorong <i>demand pull inflation</i> apabila tidak didukung ketersediaan pasokan yang memadai
Downside Risk	<ul style="list-style-type: none"> Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan dan kebijakan diskon tarif angkutan udara. Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. Upaya GPIPS yang terus digencarkan melalui program GERNAS PANGAN yang dimulai pada Februari 2026.

7.2 PROSPEK INFLASI

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan. Selain itu, sinergi TPID melalui program GPIPS diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat terjaga dalam kisaran sasaran. Selanjutnya, moderasi tarif angkutan udara sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan diperkirakan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan, komoditas energi, dan dampak rambatannya seiring berlanjutnya ketegangan geopolitik.
- Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga.
- Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.
- Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas dan harga komoditas pangan.

- Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

- Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
 - Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk penguatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
 - Meningkatkan promosi investasi didukung oleh lokasi strategis serta kepastian iklim investasi.
 - Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Kepri di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya *Johor-Singapore Special Economic Zone* dan *Eastern Economic Corridor*) melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.

2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
 - a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan *event*, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta pengembangan *quality tourism*.
 - b. Mendukung penerapan kebijakan *short term visa* guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
 - c. Meningkatkan frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Kepri untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas harga pada komoditas angkutan udara.
3. Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
4. Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
5. Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant* dan *user*, serta QRIS *cross-border*.
6. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyampaian informasi terkait pasokan, kewajaran harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan flyer.
4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyelarasan program pendukung GPIPS.
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah dengan dukungan dan kerja sama bersama asosiasi distributor.
6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GPIPS dengan fokus pada 3 (tiga) periode waktu, yaitu:
 - a. Jangka pendek: prioritas Penguatan Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang periode liburan dan tahun ajaran baru,
 - b. jangka menengah-panjang: Langkah antisipatif terhadap potensi risiko hidrometeorologi perlu terus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, disertai dengan peningkatan sinergi antarinstansi dalam memitigasi dampak rambatan lanjutan dari kenaikan harga komoditas energi dan bahan bakar.
2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk mengatasi kendala cuaca.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
MAKRO																	
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47	3,23
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94	110,31	111,68	109,83	113,19	115,90	115,39
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23	106,32	106,59	106,59	107,42	107,61	108,07
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93	105,23	104,55	105,93	106,02	106,27	106,83
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79	101,60	101,85	101,76	101,61	101,81	102,40
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91	104,11	104,26	104,93	105,64	105,97	106,29
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86	112,86	112,69	112,95	111,12	115,24	114,65
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03	99,97	99,96	99,91	99,94	99,96	100,10
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45	102,08	101,99	101,83	101,99	102,42	103,75
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15	102,23	102,24	102,27	103,58	103,63	103,72
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87	103,02	104,80	105,22	105,51	105,89	108,04
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53	114,87	119,16	123,34	126,48	134,03	139,27
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02	5,14	5,16	7,14	7,48	7,89	7,04
Ekspor Non Migas (miliar USD)**	3,38	3,92	4,28	3,82	4,13	3,56	3,65	3,66	3,62	3,88	4,15	4,47	5,01	5,23	5,11	5,37	4,83
Impor Non Migas (miliar USD)**	3,23	3,25	3,75	3,55	3,95	3,71	3,66	3,20	3,20	3,00	3,78	4,03	4,38	5,31	4,94	4,95	4,74
PERBANKAN																	
Giro (Rp miliar)	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876	34.257	32.041	35.284	38.505	40.417	41.891
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.461	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225	38.865	40.734	41.022	43.333	43.694	44.382
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040	17.950	18.373	19.443	19.835	19.003	18.392
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141	91.072	91.148	95.749	101.674	103.114	104.664
Total Asset (Rp triliun)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.479	105.336	106.380	111.55	117.07	118.94	120.32
Total Kredit (Rp triliun)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336	79.322	84.564	85.910	89.653	99.885	103,77
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%	8,59%	8,55%	8,59%	8,44%	8,34%	8,25%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,21%	4,30%	4,24%	4,32%	4,48%	4,45%	4,66%	4,24%	3,90%	3,58%
LDR (%) - Lokasi Proyek	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%	87,00%	92,78%	89,72%	88,18%	96,87%	99,15%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	2,39%	2,28%
SISTEM PEMBAYARAN																	
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944	526	884	1.250	502	507	1.558
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726	3.725	3.179	1.964	2.719	3.541	2.547
Volume Kliring Kredit (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262	82.216	63.052	60.483	65.973	79.098	60.394
Nominal Kliring Kredit (Juta Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	2.780.558	2.255.906	3.614.866	4.167.192	3.666.996	3.374.095	3.731.188	3.987.954	3.240.296	3.095.976	3.538.216	3.897.998	3.085.550

Sumber: Bank Indonesia

Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100

**) Data Sangat Sementara

***) data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau

Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Sep 2024		Des 2024		Mar 2025		Jun 2025		Sep 2025		Des 2025		Mar 2026	
		Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm
	UMUM	106,32	0,14	107,35	0,68	108,07	0,38	108,10	-0,12	109,19	0,64	111,08	1,14	111,56	0,08
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	107,94	0,10	110,31	2,05	111,68	-0,21	109,83	-0,55	113,19	1,74	115,90	2,91	115,39	0,48
a.	MAKANAN	106,33	(0,05)	108,85	2,40	110,29	-0,31	107,83	-0,69	111,50	2,01	114,58	3,46	113,64	0,49
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	108,11	0,75	109,27	0,28	110,06	0,18	110,48	0,00	110,78	0,06	110,96	0,15	111,55	0,28
c.	MINUMAN BERALKOHOL	103,06	0,02	103,06	0,00	103,69	0,00	104,14	0,00	103,07	0,00	104,74	0,00	105,77	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	122,93	0,86	124,90	0,57	126,07	0,31	128,17	0,27	131,04	0,75	132,23	0,40	134,91	0,60
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,23	0,00	106,32	-0,14	106,59	0,57	106,59	0,41	107,42	0,31	107,61	0,18	108,07	0,46
a.	PAKAIAN	106,07	0,01	106,15	-0,16	106,57	0,72	107,11	0,71	108,09	0,28	108,23	0,12	108,92	0,68
B.	ALAS KAKI	106,87	0,00	106,98	-0,07	106,69	0,00	104,61	-0,73	104,83	0,42	105,20	0,41	104,80	-0,39
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	104,93	0,18	105,23	0,03	104,55	2,33	105,93	0,09	106,02	0,00	106,27	0,01	106,83	0,04
a.	SEWA RUMAH	106,28	0,36	106,56	0,00	107,66	0,00	108,23	0,21	108,36	0,00	108,95	0,00	109,77	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,57	0,03	103,43	0,02	103,45	0,00	103,54	0,04	103,62	0,06	103,81	0,06	104,11	0,26
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	102,17	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	105,55	0,09	105,78	0,08	103,05	6,11	105,91	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	101,79	0,08	101,60	-0,05	101,85	0,02	101,76	-0,12	101,61	-0,16	101,81	-0,02	102,40	-0,06
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,16	0,05	102,25	0,09	102,62	0,00	102,62	0,00	102,65	0,03	102,58	-0,07	102,57	0,00
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,01	102,92	0,00	103,06	0,00	103,26	0,00	103,76	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	101,03	0,01	101,16	0,02	101,26	0,01	101,20	0,01	101,30	-0,02	101,36	-0,01	101,36	-0,03
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	100,49	0,00	100,49	0,00	100,64	0,15	100,64	0,00	100,64	0,00	100,88	0,24	100,88	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	104,25	0,14	104,27	0,02	104,63	0,29	104,72	-0,02	104,86	0,00	104,89	-0,01	105,26	0,24
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	101,82	0,11	101,41	-0,12	101,71	-0,01	101,56	-0,22	101,21	-0,31	101,52	-0,05	102,54	-0,12
V.	KESEHATAN	103,91	(0,01)	104,11	0,12	104,26	0,00	104,93	0,08	105,64	0,63	105,97	-0,07	106,29	0,01
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	102,23	(0,02)	102,49	0,23	102,53	0,00	103,83	0,14	105,21	1,22	105,86	-0,12	106,48	0,02
b.	JASA RAWAT JALAN	101,83	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	100,17	0,00	100,17	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00
VI.	TRANSPORTASI	111,86	0,11	112,86	0,53	112,69	-0,14	112,95	-0,25	111,12	-0,96	115,24	1,13	114,65	-0,38
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	104,60	0,02	104,81	0,05	105,39	0,00	105,88	0,00	105,74	0,34	105,82	0,00	108,28	0,36
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	113,73	(0,25)	113,33	0,04	113,68	-0,02	113,69	-0,11	113,89	0,01	114,24	0,26	113,58	0,50
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	113,55	0,61	118,19	1,68	116,07	-0,53	116,72	-0,80	108,47	-4,43	125,38	4,05	122,24	-2,88
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	116,04	8,01	122,90	6,44	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,03	0,00	99,97	0,00	99,96	-0,03	99,91	0,00	99,94	0,02	99,96	0,00	100,10	0,03
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	99,85	0,00	99,57	-0,02	99,55	-0,12	99,31	0,00	99,34	0,00	99,42	-0,01	100,04	0,13
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,34	0,34	100,34	0,00	100,34	0,00
VIII.	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	101,45	(0,06)	102,08	0,00	101,99	0,00	101,83	0,00	101,99	0,03	102,42	-0,02	103,75	0,14
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	100,33	0,01	100,37	0,00	100,37	0,00	100,26	-0,11	100,17	0,07	101,59	-0,07	105,15	0,00
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,23	0,21	100,23	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	102,07	(0,16)	103,60	-0,01	103,39	0,00	103,07	0,09	103,55	0,03	103,34	-0,09	103,71	0,34
IX.	PENDIDIKAN	102,15	0,85	102,23	0,00	102,24	0,00	102,27	0,03	103,58	1,15	103,63	0,00	103,72	0,00
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	111,10	2,45	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	114,74	3,28	114,74	0,00	114,74	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	102,40	0,00	102,87	0,00	102,94	0,00	103,12	0,17	103,12	0,00	103,43	0,00	103,97	0,00
X.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21	105,89	0,02	108,04	0,52
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21	105,89	0,02	108,04	0,52
XI.	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	112,53	0,07	114,87	0,11	119,16	1,16	123,34	0,51	126,48	2,02	134,03	1,63	139,27	-1,12
a.	PERAWATAN PRIBADI	105,61	0,12	106,15	0,09	106,29	0,08	106,87	-0,07	107,68	0,07	107,72	-0,15	107,90	0,13
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	129,45	(0,02)	135,60	-0,35	150,01	3,11	163,07	1,44	171,92	5,15	197,74	4,07	215,30	-2,63
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	109,75	0,00	109,75	0,00	109,75	0,00
d.	JASA LAINNYA	100,00	0,00	108,79	8,79	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	0,00	109,39	0,55

Sumber: BPS (data diolah)

Lampiran

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2022				2023				2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%	0,68%	0,11%	-0,06%	0,62%	1,14%	0,11%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%	0,70%	1,40%	-0,13%	0,54%	1,28%	-0,37%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%	0,64%	1,43%	-0,71%	0,99%	0,92%	0,56%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%	0,68%	0,38%	-0,12%	0,64%	1,14%	0,08%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%	0,44%	1,65%	0,19%	0,21%	0,64%	0,41%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm.Miliar Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2024			2025												2026		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
ASET	105.054	105.646	105.336	106.916	109.630	106.380	108.171	107.696	111.552	113.299	114.075	117.071	116.920	120.371	118.944	119.948	118.399	120.319
DANA PIHAK KETIGA	90.745	90.467	91.072	93.135	94.947	91.148	92.681	92.165	95.749	97.432	98.033	101.674	100.779	103.342	103.114	103.516	103.196	104.664
a. Giro	34.262	34.009	34.257	35.969	36.836	32.041	33.574	33.064	35.284	35.423	36.091	38.505	38.296	40.413	40.417	41.345	40.714	41.891
b. Tabungan	38.805	38.930	38.865	39.451	40.133	40.734	40.540	39.493	41.022	42.091	41.560	43.333	42.742	43.960	43.694	43.284	43.721	44.382
c. Deposito	17.677	17.529	17.950	17.715	17.978	18.373	18.568	19.608	19.443	19.919	20.383	19.835	19.742	18.969	19.003	18.887	18.761	18.392
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885	100.317	100.159	103.774
Modal Kerja	20.185	20.875	22.687	23.312	22.718	22.748	23.648	22.972	23.158	22.840	23.465	23.591	23.038	24.172	30.663	30.815	30.043	31.148
Investasi	30.148	29.929	30.300	30.900	31.457	34.922	34.506	34.802	35.306	36.856	37.921	38.001	38.488	39.873	40.682	40.792	41.311	43.718
Konsumsi	25.893	26.097	26.335	26.436	26.698	26.895	26.964	27.231	27.446	27.721	27.905	28.062	28.233	28.341	28.540	28.710	28.805	28.907
b. Jenis Kredit	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885	100.317	100.159	103.774
UMKM	20.185	20.875	22.687	23.312	22.718	22.748	23.648	22.972	23.158	22.840	23.465	23.591	23.038	24.172	30.663	30.815	30.043	31.148
Non UMKM	30.148	29.929	30.300	30.900	31.457	34.922	34.506	34.802	35.306	36.856	37.921	38.001	38.488	39.873	40.682	40.792	41.311	43.718
c. Kolektibilitas	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653	89.759	92.386	99.885	100.317	100.159	103.774
Lancar	69.439	70.179	73.015	73.977	74.065	78.073	78.469	78.454	79.499	80.536	81.415	82.629	82.865	85.543	93.418	94.174	93.876	96.977
D.P.Khusus	4.306	4.355	4.010	4.328	4.427	4.125	4.251	4.145	3.920	4.375	5.341	4.517	4.391	4.365	4.076	3.699	3.899	4.425
Kurang Lancar	161	155	107	154	134	132	165	182	210	172	180	162	150	141	127	159	156	147
Diragukan	256	207	139	134	198	199	176	508	526	576	570	515	479	458	457	457	1.318	1.331
Macet	2.065	2.004	2.051	2.056	2.049	2.035	2.057	1.716	1.755	1.758	1.785	1.830	1.875	1.879	1.808	1.828	910	894
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	84,00%	85,00%	87,10%	86,59%	85,18%	92,78%	91,84%	92,23%	89,72%	89,72%	91,08%	88,18%	89,07%	89,40%	96,87%	96,91%	97,06%	99,15%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,26%	3,08%	2,90%	2,91%	2,94%	2,80%	2,82%	2,83%	2,90%	2,87%	2,84%	2,80%	2,79%	2,68%	2,39%	2,44%	2,38%	2,28%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Miliar Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2024			2025									2026					
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
ASET	24.169	23.989	24.362	24.507	25.787	22.135	22.408	21.071	22.473	21.789	22.178	22.542	22.858	23.940	23.842	119.948	118.399	120.319
DANA PIHAK KETIGA	23.715	23.297	23.554	24.402	25.189	21.528	21.669	20.348	21.731	20.827	21.368	22.081	22.237	22.788	22.509	103.516	103.196	104.664
a. Giro	9.931	9.447	9.738	10.506	11.313	7.230	7.912	5.989	7.013	6.096	6.417	6.964	7.063	7.762	7.633	41.345	40.714	41.891
b. Tabungan	10.429	10.542	10.638	10.624	10.584	10.892	10.810	10.722	11.109	10.993	10.890	11.061	11.125	11.291	11.410	43.284	43.721	44.382
c. Deposito	3.356	3.308	3.178	3.273	3.292	3.406	2.947	3.637	3.609	3.738	4.061	4.057	4.048	3.735	3.466	18.887	18.761	18.392
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259	100.317	100.159	103.774
Modal Kerja	4.115	4.806	4.810	4.837	4.181	4.467	4.571	4.521	4.391	4.554	4.330	4.328	4.147	5.074	4.228	30.815	30.043	31.148
Investasi	7.274	7.131	7.170	7.152	7.148	7.230	6.762	6.721	7.266	7.457	7.603	7.049	7.051	6.717	6.660	40.792	41.311	43.718
Konsumsi	8.658	8.707	8.760	8.777	8.837	8.872	8.877	8.916	8.968	9.063	9.142	9.196	9.266	9.307	9.372	28.710	28.805	28.907
b. Jenis Kredit	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259	20.258	20.513	22.566
UMKM	4.489	4.454	4.558	4.480	4.505	4.580	4.648	4.647	4.702	4.664	4.676	4.736	4.741	4.798	4.903	4.583	4.533	4.852
Non UMKM	15.557	16.191	16.182	16.286	15.661	15.989	15.561	15.511	15.923	16.410	16.399	15.838	15.722	16.299	15.357	15.676	15.980	17.713
c. Kolektibilitas	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574	20.464	21.097	20.259	20.258	20.513	22.566
Lancar	18.739	19.333	19.555	19.338	18.689	19.187	18.738	18.704	19.194	19.032	19.055	19.267	19.193	19.844	19.133	18.996	19.176	21.302
D.P.Khusus	591	602	494	720	762	671	711	689	667	1.295	1.258	548	514	505	422	537	609	559
Kurang Lancar	42	37	39	56	47	42	90	57	46	61	63	55	50	41	30	44	44	44
Diragukan	83	48	42	43	56	52	46	430	435	396	397	401	400	382	380	376	372	367
Macet	592	623	609	610	613	617	624	277	282	291	302	303	306	325	293	305	312	294
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	84,53%	88,61%	88,05%	85,10%	80,06%	95,55%	93,26%	99,07%	94,91%	101,19%	98,63%	93,17%	92,03%	92,58%	90,01%	96,91%	97,06%	99,15%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,58%	3,43%	3,33%	3,41%	3,55%	3,46%	3,76%	3,79%	3,70%	3,55%	3,62%	3,69%	3,69%	3,55%	3,48%	3,58%	3,55%	3,12%

Sumber: Bank Indonesia

***) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Lampiran

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Kota Batam

KETERANGAN	2024			2025									2026					
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
ASET	80.885	81.657	80.974	82.409	83.843	84.245	85.763	86.625	89.079	91.510	91.897	94.529	94.062	96.430	95.102	96.987	94.605	95.582
DANA PIHAK KETIGA	67.029	67.170	67.518	68.733	69.758	69.620	71.012	71.817	74.018	76.605	76.665	79.592	78.542	80.554	80.605	81.232	80.091	80.995
a. Giro	24.332	24.562	24.519	25.463	25.523	24.811	25.662	27.075	28.271	29.326	29.674	31.541	31.232	32.651	32.785	33.925	32.685	33.309
b. Tabungan	28.376	28.387	28.227	28.827	29.549	29.842	29.730	28.772	29.913	31.098	30.670	32.272	31.617	32.669	32.284	31.865	32.077	32.714
c. Deposito	14.322	14.221	14.772	14.442	14.686	14.967	15.620	15.970	15.834	16.181	16.321	15.779	15.693	15.234	15.537	15.441	15.329	14.973
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	67.029	67.170	67.518	68.733	69.758	69.620	71.012	71.817	74.018	76.605	76.665	79.592	78.542	80.554	80.605	81.232	80.091	80.995
Modal Kerja	24.332	24.562	24.519	25.463	25.523	24.811	25.662	27.075	28.271	29.326	29.674	31.541	31.232	32.651	32.785	33.925	32.685	33.309
Investasi	28.376	28.387	28.227	28.827	29.549	29.842	29.730	28.772	29.913	31.098	30.670	32.272	31.617	32.669	32.284	31.865	32.077	32.714
Konsumsi	14.322	14.221	14.772	14.442	14.686	14.967	15.620	15.970	15.834	16.181	16.321	15.779	15.693	15.234	15.537	15.441	15.329	14.973
b. Jenis Kredit	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079	69.296	71.289	79.626	80.059	79.645	81.208
UMKM	10.014	9.993	10.274	10.247	10.473	10.918	11.108	11.136	11.372	11.106	11.475	11.420	11.385	11.574	11.888	11.633	11.556	12.220
Non UMKM	46.165	46.263	48.308	49.636	50.234	53.077	53.801	53.711	53.914	55.236	56.740	57.659	57.911	59.715	67.738	68.426	68.089	68.988
c. Kolektibilitas	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079	69.296	71.289	79.626	80.059	79.645	81.208
Lancar	50.700	50.845	53.460	54.639	55.377	58.886	59.731	59.750	60.305	61.504	62.360	63.362	63.672	65.699	74.284	75.179	74.700	75.675
D.P.Khusus	3.715	3.752	3.516	3.608	3.666	3.454	3.540	3.456	3.253	3.080	4.083	3.969	3.877	3.859	3.654	3.162	3.290	3.866
Kurang Lancar	118	118	68	98	86	90	75	125	163	111	117	107	99	99	96	115	112	103
Diragukan	173	159	97	91	142	147	130	78	91	180	173	114	79	77	76	81	946	964
Macet	1.473	1.381	1.442	1.447	1.436	1.418	1.433	1.439	1.474	1.467	1.483	1.528	1.569	1.554	1.515	1.523	598	599
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	83,81%	83,75%	86,77%	87,12%	87,02%	91,92%	91,41%	90,29%	88,20%	86,60%	88,98%	86,79%	88,23%	88,50%	98,79%	98,56%	99,44%	100,26%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,14%	2,95%	2,74%	2,73%	2,74%	2,59%	2,52%	2,53%	2,65%	2,65%	2,60%	2,53%	2,52%	2,43%	2,12%	2,15%	2,08%	2,05%

Sumber: Bank Indonesia

Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2024						2025						2026			
	II		III		IV		I		II		III		IV		I	
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari
A. WARKAT KLIRING KREDIT																
1. WARKAT(Lbr)	69.283	1.117	69.262	1.117	82.216	1.326	63.052	1.017	60.493	976	65.973	1.064	79.098	1.276	60.384	974
2. NOMINAL(Jt.Rp)	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180	3.987.954	64.322	3.240.296	52.263	3.095.976	49.935	3.538.216	57.068	3.897.998	62.871	3.085.550	49.767

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile food</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Netflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersial yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoj (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tik. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

